

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2025-2029

JL. KOL. H. SOETADJI NO.01, TJ. SELOR HILIR, KEC. TJ. SELOR, KABUPATEN BULUNGAN, KALIMANTAN UTARA 77216

@DISHUB_KALTARA

DISHUB@KALTARAPROV.GO.ID

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Perhubungan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan untuk membangun sektor transportasi di Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Renstra Dinas Perhubungan ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan di bidang perhubungan. Secara berjenjang dokumen Renstra Dinas Perhubungan akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2029.

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta usaha yang maksimal, pada kesempatan ini kami mengajak kepada semua pihak terkait untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang perhubungan guna tercapainya sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

Tanjung Selor, 20 Agustus 2025

Kepala Dinas



H. IDHAM CHALID, S.Pi.,MP
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19751009 200112 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 8
2.1.1 Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Induk 8
2.1.2 Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan 8
2.2 Struktur Organisasi 9
2.2.1 Kepala Dinas Perhubungan 11
2.2.2 Sekretaris Dinas Perhubungan 12
2.2.3 Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 14
2.2.4 Kepala Bidang Pelayaran 16
2.2.5 Kepala Bidang Pengembangan Transportasi 20
2.2.6 Kepala UPTD Pelabuhan Pada Dinas Perhubungan 23
2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah 24
2.3.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara 24
2.3.2 Kondisi Sarana Dan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara 26
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 31
2.5 Kelompok Sasaran Layanan 57
2.6 Mitra Dinas Perhubungan Dalam Pemberian Pelayanan 58
2.7 Permasalahan Pelayananan Perangkat Daerah 59
2.8 Isu Strategis Perangkat Daerah 62
2.8.1 Isu Global 62
2.8.2 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 63
2.8.3 Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029 63
2.8.4 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara 64
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KERJAAN 67
3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 67
3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 70

3.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah 71
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 72
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah 72
4.2 Kinerja Pelayanan Bidang Urusan 179
BAB V PENUTUP 181
5.1 Kesimpulan 181
5.2 Kaidah Pelaksanaan 181
5.3 Pengendalian Dan Evaluasi 182

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Dan Pendidikan Terakhir Dinas Perhubungan 24
Tabel II.2 Jumlah PNS berdasarkan Pangkat Dan Golongan dan PPPK berdasarkan Golongan Dinas Perhubungan 25
Tabel II.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Esselon Dinas Perhubungan 26
Tabel II.4 Jumlah Sarpras Dinas Perhubungan (Induk) Berdasarkan Jenisnya 27
Tabel II.5 Jumlah Sarpras UPTD Pelabuhan Tengkayu I Berdasarkan Jenisnya 28
Tabel II.6 Jumlah Sarpras UPTD Liem Hie Djung Berdasarkan Jenisnya 30
Tabel II.7 Kinerja Dinas Perhubungan 2020 sampai dengan 2024 32
Tabel II.8 Capaian Indikator Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan 2020 sampai dengan 2024 35
Tabel II.9 Kinerja Dinas Perhubungan 2020 sampai dengan 2024 52
Tabel II.10 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara 57
Tabel II.11 Jenis layanan mitra Dinas Perhubungan 58
Tabel II.12 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 60
Tabel II.13 Penentuan Isu Strategis Dinas Pehubungan 65
Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara 69
Tabel III.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan 70
Tabel III.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah 71
Tabel IV.1 Cascading Perumusan Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan 73
Tabel IV.2 Pagu Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Beserta UPTD Pelabuhan 100
Tabel IV.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara 178
Tabel IV.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara 179
Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara 180

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara 10
Gambar II.2 Grafik Capaian Kinerja Dinas Perhubungan 33
Gambar II.3 Grafik Presentase Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan 56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan Pembangunan daerah jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun. Sebagai tindak lanjutnya Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara menyusun Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD).

Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terlebih menyangkut kualitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pengembangan urusan perhubungan Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara yang memuat visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yang kemudian dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. RPJMD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang bersifat jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara periode 2025-2029, yaitu Dr. H. Zainal Paliwang, SH., M.Hum dan Ingkong Ala, SE., M.Si., pada tanggal 20 Februari 2025 menjadi permulaan periode pembangunan daerah yang baru yang perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan RPJMD 2025-2029. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah **“Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan”**.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan tahapan: 1). Persiapan, 2). Penyusunan rancangan awal, 3). Penyusunan rancangan, 4). Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, 5). Penyusunan rancangan akhir, dan 6). Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain memedomani RPJMD, penyusunan Renstra juga memedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan memperhatikan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Selanjutnya, Renstra menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara 2025- 2029, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara 2025- 2029, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
9. Undang-undang (UU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7003);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 31 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian sebagaimana telah diubah dengan PP No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2011 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 No. 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5229);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara No.6642);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5731);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara No.6642);
21. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 7115);
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

(Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2013 Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 514);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1392);
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 224);
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 834);
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rute Aman Selamat Sekolah (Rass) (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 179);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 908);
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Sektor Perhubungan Bidang Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1674);
32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 311);
33. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

37. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 529);
38. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 648);
39. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 778);
40. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
41. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 780);
42. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kelaiklautan Kapal Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 681);
43. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Peyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 347);
44. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 812);
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
47. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepelabuhanan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2);
50. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
51. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 14);
52. Peraturan Daerah Provinsi... ... Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;

53. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Penyeberangan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 44);
54. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara ; dan
55. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2025 - 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 yaitu menyediakan kebijakan pembangunan di bidang Perhubungan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kalimantan Utara 2025 – 2029 adalah:

1. Memberikan gambaran kinerja, permasalahan dan isu strategis bidang Perhubungan.
2. Menerjemahkan visi, misi dan program prioritas gubernur dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara secara nyata ke dalam tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan.
3. Menentukan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4. Menetapkan indikator kerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) bidang Perhubungan.
5. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis kinerja.
6. Menyediakan instrumen pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan di sektor Perhubungan yang efektif, efisien dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 secara sistematika tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Induk
2.1.2 Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan
2.2 Struktur Organisasi
2.2.1 Kepala Dinas Perhubungan
2.2.2 Sekretaris Dinas Perhubungan
2.2.3 Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2.2.4 Kepala Bidang Pelayaran
2.2.5 Kepala Bidang Pengembangan Transportasi
2.2.6 Kepala UPTD Pelabuhan Pada Dinas Perhubungan
2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara
2.3.2 Kondisi Sarana Dan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.5 Kelompok Sasaran Layanan
2.6 Mitra Dinas Perhubungan Dalam Pemberian Pelayanan
2.7 Permaslahan Pelayananan Perangkat Daerah
2.8 Isu Strategis Perangkat Daerah
2.8.1 Isu Global
2.8.2 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan
2.8.3 Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029
2.8.4 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KERJAAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
3.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah
4.2 Kinerja Pelayanan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan
5.2 Kaidah Pelaksanaan
5.3 Pengendalian Dan Evaluasi

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk memberikan pelayanan bidang kepelabuhanan, Dinas Perhubungan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan Pada Dinas Perhubungan serta Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan Pada Dinas Perhubungan.

berikut akan diuraikan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Induk, UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, dan UPTD Pelabuhan Liem Hiedjung Nunukan.

2.1.1 Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Induk

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
3. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayaran;
4. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan transportasi;
5. penyelenggaraan urusan kesekertariatan;
6. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan Pada Dinas Perhubungan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan Pada Dinas Perhubungan, uraian tugas dua UPTD Pelabuhan adalah sebagai berikut;

1. UPTD Pelabuhan melaksanakan tugas teknis operasional di bidang transportasi pelayaran dan kepelabuhanan pada Dinas;
2. Transportasi pelayaran dan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud diatas diberikan berupa pengangkutan orang dan barang yang dilaksanakan oleh penyedia moda pelayaran kabupaten/kota.

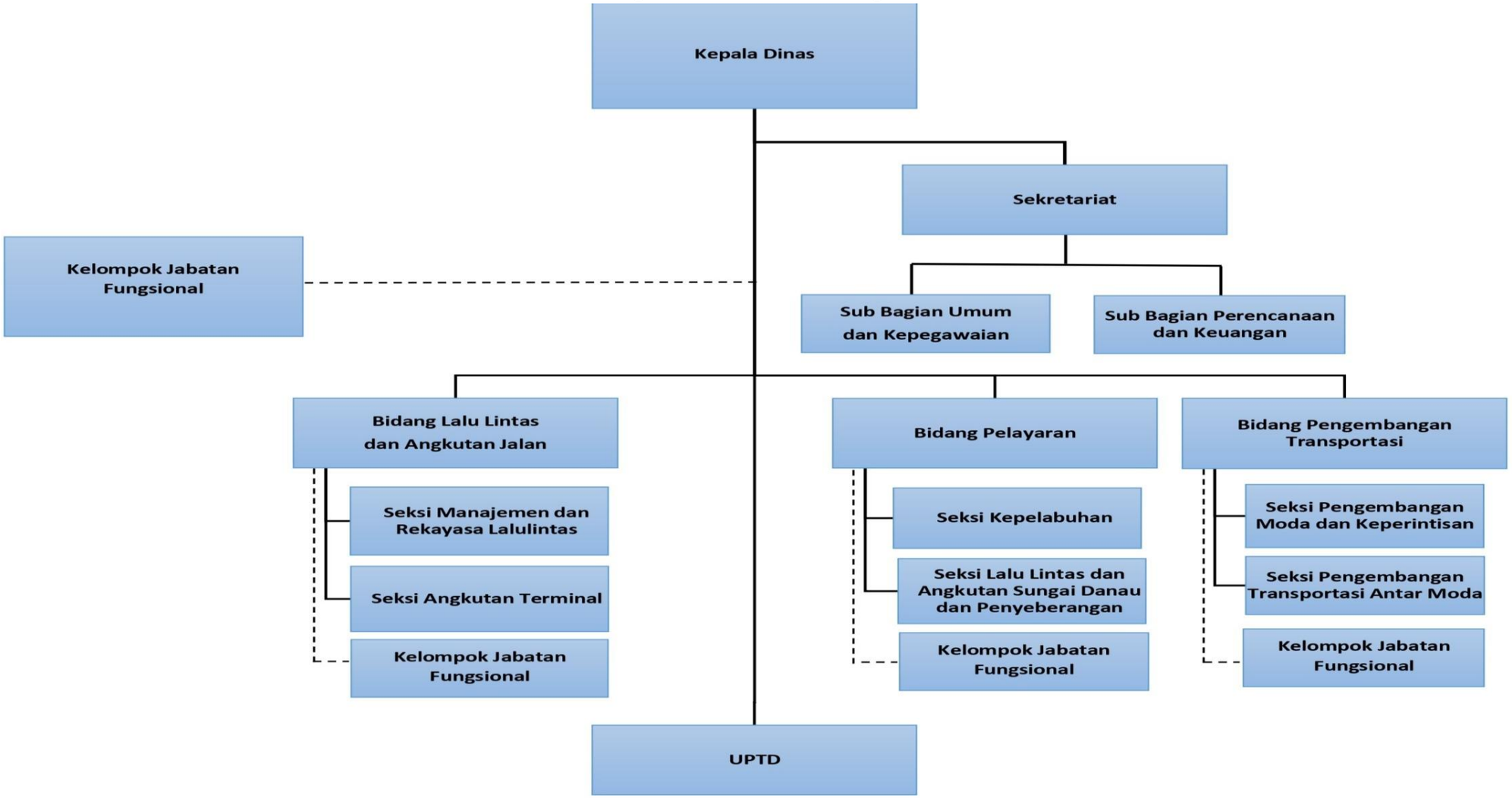
Adapun fungsi dua UPTD Pelabuhan adalah sebagai berikut;

1. Merencanakan pengelolaan pelayanan di Bidang Pelayaran dan Kepelabuhanan;
2. Menyelenggarakan pelayanan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan;
3. Melaporkan dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, adapun susunan organisasi dan tugas masing-masing pejabat, serta bagian pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

2.2.1 Kepala Dinas Perhubungan

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan Penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
2. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
3. Mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
5. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
6. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
7. Menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Perhubungan dan menetapkan standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
9. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/ Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
10. Memfasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatanagar penanganan permasalahan tepat sasaran;
11. Melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
12. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
13. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
14. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2.2.2 Sekretaris Dinas Perhubungan

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan. Adapun fungsi dari Sekretaris adalah sebagai berikut:

1. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan;
2. memberikan dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
3. melakukan penataan organisasi dan tatalaksana;
4. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
6. memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundangundangan untuk keberhasilan program kerja;
7. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
8. mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris membawahi dua Sub bagian yaitu Sub bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub bagian Umum Dan Kepegawaian dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan

1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
2. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
3. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
4. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Subbagian Perencanaan dan keuangan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas
5. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Rencana Kerja (RENJA) sesuai peraturan perundang-undangan sebagai acuan kegiatan;
6. menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal UPTD sesuai peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas;
7. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan perencanaan program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan guna optimalisasi tugas;

8. mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan;
10. Meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran agar tertib administrasi keuangan;
11. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk optimalisasi tugas.

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pada Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
2. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
3. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
4. Menyiapkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, kearsipan, dokumentasi, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi
5. mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan agar tertib administrasi;
6. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
7. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penataan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) instansi
8. menyusun dan membuat laporan inventaris barang/aset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2.2.3 Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Dengan tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun fungsi Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan terminal;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan terminal;
3. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
4. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan Darat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
5. mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untukoptimalisasi tugas;
6. melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta asosiasi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
7. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara dan pengguna jasa angkutan jalan;
8. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis lalu lintas, angkutan jalan dan sarana serta prasarana jalan,
9. menetapkan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) provinsi,
10. mengatur dan mengawasi lokasi penetapan, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi,
11. melaksanakan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk ruas jalan provinsi,
12. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai,
13. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan terminal,
14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang LLAJ membawahi dua Seksi yaitu Seksi Angkutan Dan Terminal dan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu lintas dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Angkutan Dan Terminal

1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Angkutan Terminal berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan;
2. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
3. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
4. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Angkutan Terminal berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk optimalisasi tugas;
5. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkaitan dengan masalah standarisasi angkutan darat serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan angkutan jalan;
6. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal tipe B;
7. penyiapan bahan dan penyusunan tarif angkutan penumpang umum yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
8. penyiapan bahan pengumpulan data pelayanan angkutan secara berkala;
9. melaksanakan penetapan rencana umum jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi;
10. melaksanakan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi;
11. penetapan wilayah operasi dan pengembangan teknis angkutan taksi dalam wilayah perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah Kabupaten/Kota dalam daerah provinsi;
12. penetapan wilayah operasi dan pengembangan teknis angkutan dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi;
13. menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk perijinan angkutan orang dalam trayek dan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi;
14. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
15. menyiapkan bahan laporan pendataan, pembinaan dan penertiban angkutan jalan dan terminal sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
16. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas darat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan
2. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
3. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
4. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
5. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkaitan dengan masalah standarisasi lalu lintas darat serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas darat;
6. melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas darat;
7. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
8. melakukan penyiapan bahan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;
9. menyiapkan bahan untuk kebutuhan perlengkapan jalan untuk jaringan jalan provinsi;
10. menyiapkan bahan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi
11. menyiapkan bahan laporan pendataan, Pembinaan dan penertiban lalu lintas darat sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2.2.4 Kepala Bidang Pelayaran

Kepala Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran. Kepala Bidang Pelayaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bahan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan,
2. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pelayaran sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif:
3. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing:
4. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas,

5. mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayaran dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas,
6. melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal, BUMN serta Asosiasi di bidang Pelayaran,
7. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara dan pengguna jasa Pelayaran,
8. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan,
9. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis di Bidang Pelayaran yang meliputi lalu lintas perhubungan laut dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP):
10. penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) atau Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan regional,
11. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai,
12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayaran untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan,
13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Pelayaran membawahi dua Seksi yaitu Seksi Kepelabuhanan dan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyebrangan dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Kepelabuhanan

1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Kepelabuhanan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan:
2. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu
3. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik,
4. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Kepelabuhanan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas,
5. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkaitan masalah standarisasi kepelabuhanan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepelabuhanan,
6. melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan perencanaan kepelabuhanan:
7. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan penyelenggaraan
   kepelabuhanan,
8. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan, program pembangunan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan serta penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhan,

9. melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) atau Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, fasilitas dan operasional pelabuhan:
10. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional
11. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang beroperasi pada antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi:
12. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin usaha badan usaha pelabuhan pada pelabuhan pengumpan regional,
13. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin pengembangan pelabuhan pada pelabuhan pengumpan regional:
14. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam pada pelabuhan pengumpan regional:
15. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin reklamasi dan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional:
16. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) atau Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan pengumpan regional,
17. menyusun dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan,
18. penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan,
19. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian teknis dan pelayanan perizinan penambahan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan:
20. menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk pembangunan pelabuhan pengumpan regional, pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional, serta pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi,
21. menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk kegiatan reklamasi dan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional:
22. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi kepelabuhanan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang
23. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai,

24. menyiapkan bahan laporan pendataan, pembinaan dan penertiban kepelabuhanan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya,
25. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyebrangan

1. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu
2. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik,
3. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas,
4. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkaitan masalah standarisasi lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan:
5. melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan,
6. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis untuk izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk kapal yang melayani trayek antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah provinsi,
7. menyiapkan bahan dan data perencanaan umum jaringan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan, menetapkan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian
8. untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi,
9. penyiapan bahan penataan alur pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta penataan pemanfaatan lahan tepian sungai dan danau:
10. menentukan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan, antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah provinsi:
11. menyiapkan bahan dan data serta analisa kebutuhan armada angkutan sungai, danau dan penyeberangan:
12. menyiapkan bahan dan data serta melakukan penyusunan tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang beroperasi pada antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi:
13. menyiapkan data pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan secara berkala,
14. mengupayakan realisasi Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penumpang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan agar dapat terus melayani masyarakat,

15. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
    kegiatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan:
16. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan angkutan sungai, danau dan penyeberangan,
17. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan
    cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai:
18. menyiapkan bahan laporan pendataan, pembinaan dan penertiban lalu
    lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai bahan
    evaluasi kegiatan selanjutnya:
19. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2.2.5 Kepala Bidang Pengembangan Transportasi

Kepala Bidang Pengembangan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan transportasi. Kepala Bidang Pengembangan Transportasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pengembangan Transportasi dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja,
2. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pengembangan Transportasi sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif:
3. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing:
4. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Transportasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas,
5. mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Transportasi dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas,
6. melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal, BUMN serta asosiasi di bidang pengembangan transportasi:
7. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara keterpaduan antarmoda:,
8. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis pengembangan transportasi,
9. menetapkan rencana induk perkeretaapian provinsi serta rencana pengembangan perkeretaapian provinsi:
10. mengatur dan mengawasi lokasi penetapan, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengembangan transportasi antarmoda,
11. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai:

12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Transportasi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan,
13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Pengembangan Transportasi membawahi dua Seksi yaitu Seksi Pengembangan Transportasi Antar Moda dan Pengembangan Moda dan Keperintisan dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Pengembangan Transportasi Antar Moda

1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengembangan Transportasi Antar Moda berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan;
2. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
3. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
4. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengembangan Transportasi Antar Moda berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
5. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait berkaitan masalah standarisasi pengembangan transportasi antar moda serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan transportasi antar moda;
6. melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan pengembangan transportasi antar moda;
7. menyiapkan penyusunan studi pengembangan transportasi antarmoda;
8. menyiapkan bahan terkait regulasi pelaksanaan angkutan antarmoda di lingkup antar Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi;
9. merencanakan pengembangan transportasi berkelanjutan;
10. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengembangan Transportasi Antar Moda;
11. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Transportasi Antar Moda dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang,
12. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai,
13. menyiapkan bahan laporan pengembangan transportasi antar moda sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
14. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan

2. Kepala Seksi Pengembangan Moda Keperintisan

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengembangan Moda dan Keperintisan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan:
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik:
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengembangan Moda dan Keperintisan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait berkaitan masalah standarisasi pengembangan moda dan keperintisan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan moda dan keperintisan;
6. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan pengembangan moda dan keperintisan;
7. Menyiapkan penyusunan studi pengembangan moda transportasi yang relevan di masa mendatang;
8. Mengupayakan realisasi Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penumpang udara agar dapat terus melayani masyarakat:
9. Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan subsidi angkutan perintis udara;
10. Menyusun bahan pengembangan studi dan penelitian masalahmasalah transportasi;
11. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengembangan Moda Dan Keperintisan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Moda Dan Keperintisan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
13. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
14. Menyiapkan bahan laporan pengembangan moda dan keperintisan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2.2.6 Kepala UPTD Pelabuhan Pada Dinas Perhubungan

Dengan tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional di UPTD pelabuhan pada Dinas Perhubungan. Adapun fungsi Kepala UPTD Pelabuhan pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut;

a. Merencanakan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan di bidang pelayaran dan pelabuhan berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
b. Mengoordinasikan penyelenggaraan teknis operasional pelayanan di bidang pelayaran dan kepelabuhan serta ketatausahaan UPTD;
c. Melaporkan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pelayanan di bidang pelayaran dan pelabuhan serta ketatausahaan UPTD.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan pada Dinas Perhubungan membawahi kepala seksi/sub bagian sebagai berikut:

1. **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

   Mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum, dengan fungsi sebagai berikut;
   a. Penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
   b. Penyelenggaraan, pembinaan administrasi, dan aparatur UPTD;
   c. Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan ketatausahaan UPTD.

2. **Kepala Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhanan**

   Mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam hal pelayanan kepelabuhanan, dengan fungsi sebagai berikut:
   a. Penyiapan bahan petunjuk teknis operasional di bidang pelayanan kepelabuhanan;
   b. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD di bidang pelayanan pelabuhan;
   c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pelabuhan.

3. **Kepala Seksi Operasional Sarana Dan Prasarana Keselamatan Angkutan Perairan**

   Mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam hal keselamatan angkutan perairan, dengan fungsi sebagai berikut:
   a. Penyiapan bahan petunjuk teknis operasional di bidang sarana dan prasarana keselamatan angkutan perairan;
   b. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD di bidang sarana dan prasarana keselamatan angkutan perairan;
   c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana keselamatan angkutan perairan.

Pada tahun 2022 dilakukan penyetaraan Pejabat Struktural menjadi Pejabat fungsional oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Diantaranya Kepala Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Operasional (Wasdalops),Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pengembangan Teknologi Transportasi menjadi Pejabat Fungsional

Berdasarkan hasil evaluasi renstra periode 2021-2026 terdapat permasalahan dalam pembagian tugas pokok dan fungsi pelaksanaan kegiatan. Hal ini mengakibatkan terjadinya irisan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang teknis khususnya pada bidang Pengembangan Transportrasi. Pada UPTD akan dilakukan penajaman tugas pokok dan fungsi pada tiap Seksi. Maka dari itu akan dilakukannya perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kelola (SOTK).

2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan aset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.

2.3.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara memiliki total 250 Pegawai yang terdiri dari ASN dan Non ASN. Jumlah ini juga termasuk pegawai yang ada di UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan dan Liem Hie Djung Nunukan. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Dan Pendidikan Terakhir Dinas Perhubungan

No	Kualifikasi Pendidikan	ASN		Non ASN	
		Laki-laki	Perermpuan	Laki-laki	Perermpuan
1	SD	-	-	2	3
2	SMP	1	-	-	1
3	SMA/SMK	38	12	38	15
4	Diploma 2 (D-II)	-	-	-	-
5	Diploma 3 (D-III)	23	9	8	-
6	Sarjana (S1/D-IV)	40	21	21	13
7	Pasca Sarjana (S-2)	4	1	-	-
Jumlah		**106**	**43**	**69**	**32**
		138		**101**	
Total		**250**			

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Pada tabel diatas disajikan data klasifikasi pegawai dishub berdasarkan status kepegawaian, kualifikasi pendidikan, dan gender. pada kualifikasi pendidikan Dari total 250 tenaga kerja, ASN didominasi oleh lulusan S1 ke atas, sementara Non-ASN lebih banyak berlatar belakang SMA/SMK. Hal ini mencerminkan bahwa rekrutmen ASN mensyaratkan kompetensi akademik yang lebih tinggi karena tanggung jawabnya yang strategis dan administratif.

Sebaliknya, Non-ASN lebih fleksibel, banyak dipekerjakan untuk tugas teknis dan operasional yang tidak selalu memerlukan pendidikan tinggi.

Distribusi ini juga menunjukkan upaya pemerintah menempatkan ASN pada posisi yang menuntut analisis, perencanaan, dan kebijakan, sementara Non-ASN mengisi kebutuhan tenaga pendukung. mayoritas tenaga Non-ASN ditempatkan pada pelayanan di UPTD Pelabuhan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan yang ditugaskan untuk Personel tekhnis lapanganNamun, ketimpangan pada jenjang pascasarjana dan gender menandakan perlunya peningkatan akses pendidikan lanjut dan kebijakan yang lebih inklusif dalam pengembangan SDM.

Pengembangan kualifikasi pendidikan yang ada di Dinas Perhubungan akan berdampak pada meningkatnya kinerja dinas perhubungan, khususnya pada sektor analisis teknis dan manajemen administratif. dari data diatas juga akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selain klasifikasi pendidikan, berikut disajikan tabel klasifikasi berdasarkan pangkat dan golongan, serta rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional sebagai berikut:

Tabel II.2 Jumlah PNS berdasarkan Pangkat Dan Golongan dan PPPK berdasarkan Golongan Dinas Perhubungan

No	Pangkat dan Golongan	PNS	
		Laki-laki	Perermpuan
1	Pengatur (II/c)	12	2
2	Pengatur (II/d)	12	5
3	Penata Muda (III/a)	11	-
4	Penata Muda Tk. I (III/b)	10	6
5	Penata (III/c)	7	2
6	Penata Tk. I (III/d)	6	2
7	Pembina (IV/a)	3	1
8	Pembina Tk. I (IV/b)	2	-
9	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-
Jumlah		**64**	**18**
Total		**82**	
No	Pangkat dan Golongan	PPPK	
		Laki-laki	Perermpuan
1	Golongan IX	7	11
2	Golongan VII	6	2
3	Golongan V	29	12
Jumlah		**35**	**25**
Total		**67**	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Tabel II.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Esselon Dinas Perhubungan

No	Jabatan	ASN	
		Laki-laki	Perermpuan
1	Eselon II	1	-
2	Eselon III	4	1
3	Eselon IV	10	2
4	Pejabat Fungsional	3	
Jumlah		**18**	**3**
Total		**21**	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

2.3.2 Kondisi Sarana Dan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Sarana dan prasarana (Sarpras) kantor yang memadai sangat penting bagi instansi pemerintah dalam mendukung efektivitas kerja dan pelayanan publik. Fasilitas seperti ruang kerja yang layak, perangkat teknologi, kendaraan dinas, dan sistem informasi berperan langsung dalam menunjang tugas administrasi maupun operasional di lapangan. pada subbab ini kan menggambarkan kondisi sarana dan prasrana yang dimiliki Dinas Perhubungan dan masing-masing UPTD

Pada Dinas Perhubungan (Induk) memiliki banyak sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Instansi. Sarana dan prasarana ini Sebagian besar menunjang kinerja pegawai Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari. Namun pada kondisi eksisting rata-rata 28% sarana dan prasarana Dinas Perhubungan dalam kondisi kurang layak. Jika dilihat dari nilai rata-ratanya presentase ini mengindikasikan bahwa mayoritas Sarpras yang dimiliki Dinas Perhubungan masih dalam kondisi layak, akan tetapi pada kenyataannya sangat banyak *item-item* Sarpras utama Dinas Perhubungan yang kondisinya tidak layak. Contohnya pada Sarpras *Personal Computer (PC) dan* Laptop yang kondisinya diatas 50% sudah tidak layak, kemudian Peralatan mesin lainnya seperti *printer, Scaner, GPS,* dll juga kondisinya 50% tidak layak, bahkan beberapa Sarpras perlatan mesin lainyya kondisi keseluruhannya sudah tidak layak contohnya *microphone* dan mesin ketik manual. Kemudian pada Sarpras Meubeler rata-rata tidak dalam kondisi layak dikarenakan mayoritas pengadaannya diatas 3 tahun dan beberapa sudah rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.

Adapun beberapa Sarana Kendaraan juga perlu adanya pengadaan baru karena usia pakai yang sudah sangat lama, yaitu Kendaraan Pengawasan Dan Pengendalian (WASDAL) angkutan darat dan *Speed boat* pengawasan angkutan perairan juga sudah dalam kondisi yang sudah kurang layak. Selebihnya Sarpras pendukung seperti televisi, LCD, Proyektor dan Sarpras pendukung lainnya masih dalam kondisi baik.

Selain Sarpras Kantor, Pada table Dinas Perhubungan berikut juga terdapat data Sarana dan Prasarana yang diadakan untuk mendukung kinerja Dinas Perhubungan pada sektor Keselamatan Lalu lintas maupun sarana kinerja perhubungan lainnya yang pengadaannya terhitung baru (1-3 Tahun) sehingga masih dalam kondisi baik.

Tabel II.4 Jumlah Sarpras Dinas Perhubungan (Induk) Berdasarkan Jenisnya

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	P.C Unit	28	25	53
2	Laptop	20	21	41
3	Printer	28	34	62
4	Scanner	1	1	2
5	Sepeda Motor	8	5	13
6	Mobil	6	1	7
7	Bus	0	3	3
8	Mini Bus	1	0	1
9	Speed Boat	0	1	1
10	Kapal Pelayaran Rakyat	1	0	1
11	Meja	30	17	47
12	Kursi	25	25	50
13	Genset	2	1	3
14	Roll Meter	4	0	4
15	Gps	3	5	8
16	Timbangan Kendaraan	1	0	1
17	Lemari	9	15	24
18	Mesin Ketik	0	4	4
19	Drone	1	1	2
20	Mesin Absen	1	0	1
21	Rak Kayu	1	0	1
22	Peti Uang	1	1	2
23	CCTV	7	0	7
24	X-ray	1	0	1
25	Alat Penghancur Kertas	2	0	2
26	LCD Proyektor	3	0	3
27	Tempat Tidur Kayu	1	0	1
28	Mesin Pemotong Rumput	1	0	1
29	Lemari Es	1	1	2
30	Televisi	3	3	6
31	Sound System	4	0	4
32	Microphone Table Stand	19	1	20
33	Camera Video	4	9	13
34	Handy Cam	1	0	1
35	Dispenser	1	1	2
36	PJU Malinau	11	0	11
37	Garasi Speed Boat	1	0	1
38	Jembatan Penyebrangan Orang	1	0	1
39	Pelabuhan Bebatu KTT	1	0	1
40	Halte BRT Tarakan	9	0	9
41	Kursi Ruang Tunggu	2	1	3
42	Microphone Wireless	0	4	4
43	UPS	0	11	11
44	Tripod Camera	1	0	1
45	Rambu Jalan	41	0	41

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
46	Handy Talky (HT)	15	0	15
47	Facimilie	0	1	1
48	Handphone	1	0	1
49	Alat Pemadam Kebakaran	3	0	3
50	Perangkat Zoom Meeting	1	0	1
51	Mixer Rauter	2	0	2
52	Traffic Light	19	0	19
53	Rambu Bersuar Lainnya	60	0	60
54	Rambu Tidak Bersuar Lainnya	34	0	34
55	Peralatan Permainan	1	0	1
56	Peralatan Olahraga	1	0	1

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Berbeda denga Dinas Induk, Pada UPTD Tengkayu I Tarakan terdapat Sarana Dan Prasarana Penunjang yang mana selain menunjang kinerja kantor UPTD, juga menunjang pelayanan bagi pengguna jasa pelabuhan berikut sarana dan prasarana yang dimiliki UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan:

Tabel II.5 Jumlah Sarpras UPTD Pelabuhan Tengkayu I Berdasarkan Jenisnya

No.	Jenis Sarana Dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	Micro Bus/Bus	3	2	5
2	Motor Dinas	3		3
3	Mobil Dinas	1		1
4	Jaringan listrik	1		1
5	Instalasi air	1		1
6	Jalan/trestle dermaga	1		1
7	Terminal	1		1
8	Tempat Parkir	1		1
9	Dropzone	1		1
10	Parkiran Bus	1		1
11	Gudang	1	1	2
12	Gedung Kantor	1		1
13	Dermaga	3		3
14	Halte/Shelter	1		1
15	Pos jaga	2		2
16	Jalan/trestle/Selasar jln kaki	1		1
17	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	6	19	25
18	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5	20	25
19	Kursi Ruang Tunggu	46	34	80
20	Kursi Biasa	6		6
21	Meja kerja	20		20

No.	Jenis Sarana Dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
22	Sofa	1		1
23	Meja (rapat dan tamu)	4		4
24	Lemari	14		14
25	Printer	6		6
26	Handy Talky (HT)	4	1	5
27	P.C Unit/Computer PC	8		8
28	Laptop	1		1
29	Alat komunikasi telephone lainnya (dst)/HP	1		1
30	Perangkat CCTV Dekoder + Box	2		2
31	Perangkat Elektronik	29		29
32	Pendingin Ruangan	10	3	13
33	Kulkas	1		1
34	Alat Keuangan	3		3
35	Alat Penghancur Kertas	1		1
36	Alat timbangan/biara lainnya (dst)	1		1
37	Kipas Angin	2		2
38	Pompa Air	4		4
39	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	4	1	5
40	Kontainer Sampah	1		1
41	Wheel Chair/Kursi Roda	1		1
42	Tandu Lipat	1		1
43	Alat Pertukangan	6		6
44	Baggage Trolly	2	3	5
45	Mesin Portal	4		4
46	Traffic Cone	5	8	13
47	Waterbarrier	7	5	12
48	Rambu Portable	5	5	10

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Dinas Perhubungan Melalui UPTD Tengkayu I Tarakan, terus melakukan upaya untuk peningkatan pelayanan untuk pengguna jasa transportasi. maka dari itu diperlukan penyediaan sarana dan prasarana yang baik. dari sisi pelayanan kepelabuhanan beberapa prasarana utama sudah tersedia mulai dari dermaga, dropzone penumpang, hingga fasilitas parkir yang diperuntukan untuk pengguna jasa yang kondisinya layak. sarana kendaraan seperti bus juga tersedia di UPTD tengkayu yang diperuntukan untuk mobilisasi pengguna jasa, walaupun fasilitas ini terus dilakukan perbaikan guna meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa. dari sisi sarana dan Prasarana perkantoran, perlu dilakukannya peremajaan fasilitas kantor mulai dari pengadaan meubel (Meja,Kursi, Dan Lemari Arsip) hingga pemenuhan fasilitas seperti peralatan Komputer untuk menjalankan administrasi pelayanan pada Pelabuhan.

Sama halnya dengan UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan Juga memiliki sarana dan prasarana yang fungsinya sama dengan Pelabuhan Tengakyu I

Tarakan, berikut data Sarana dan Prasarana UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan :

Tabel II.6 Jumlah Sarpras UPTD Liem Hie Djung Berdasarkan Jenisnya

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	Pick up	1	-	1
2	Sepeda Motor	2	-	2
3	Ac Spilit	4	-	4
4	Air Condetioner (Ac)	1	3	4
5	Laptop	5	-	5
6	Handi Talky (HT)	8	1	9
7	Printer	7	1	8
8	Lemari Es	3	-	3
9	Dispenser	1	2	3
10	Lemari Brankas	1	-	1
11	Meja Kerja Kayu 1 Biro	1	-	1
12	Meja Rapat	2	-	2
13	Meja ½ Biro	25	1	26
14	P.C Unit	7	1	8
15	Bangku Tunggu	35	-	35
16	Sofa	2	-	2
17	Mesin Rumput	2	-	2
18	Televisi	1	-	1
19	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	1	-	1
20	Lemari Arsip Kayu	11	-	11
21	Wheel Chair (Alat Kesehatan)	1	-	1
22	Pompa Air	2	-	2
23	Tangga Almunium	2	-	2
24	Tangki Air	4	-	4
25	Alat Komunkasi (Hp)	1	-	1
26	LCD Proyektor	1	-	1
27	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	32	-	32
28	Kursi Fiber	69	1	70
29	Gerobak Dorong (Troly)	13	-	13
30	Filing Kabinet	3	1	4
31	Hand Metal Detector (Pro Chek II 18 Zores)	2	-	2
32	Hand Metal Detector (Super Wand Garret)	6	1	7
33	Kursi Besi Metal	1	-	1
34	Kursi Putar	14	-	14
35	Meja Kerja Peawai Non struktural	11	8	19
36	Lemari Buku Arsip (Besi Metal)	8	1	9
37	Radio Rik	1	-	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
38	Karpet	2	-	2
39	Mesin Ketik Manual (Portabel)	2	-	2
40	Whaite Board	3	1	4
41	Papan Nama Instansi	2	-	2
42	Bangku Tunggu (Donnati)	20	-	20
43	Sound Sistem	1	-	1
44	Kamera Electrik	-	13	13
45	Meja Reseptioner (Meja Security)	6	3	9
47	Portable Generating Set (Genset)	-	1	1
48	Portable Water Pamp (Mesin Celup)	1	-	1
49	Papan Pengumuman (Neon Box)	1	-	1
50	Timbangan Barang	1	-	1
51	Gordyn / Kray	1	-	1
52	Alat Pemadam Kebakaran	9	-	9
53	Meja Pemerisa Bagasi	3	-	3
54	UPS	-	2	2
55	Rak Kayu	-	1	1
56	Meja Makan	-	4	4
57	Kursi Rapat	-	4	4
58	Kursi Biasa	4	-	4
59	Sekat/Partisi Pemisah	440	-	440
60	Makket	10	3	13
61	Halte Bus	2	-	2
62	Kanopi PLBL	1	-	1
63	Gapura PLBL	1	-	1
64	Dermaga	3	-	3

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Sama seperti Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, pada Pelabuhan Liem Hie Djung terdapat sarana dan Prasarana untuk pelayanan pada pengguna jasa pelabuhan, dari data tersebut mayoritas Sarpras dalam kondisi baik. Tetapi kedepannya UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung akan terus melakukan pembaharuan kondisi Sarpras guna meningkatkan kinerja dan pelayanan Pelabuhan.

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimanta Utara telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada tabel berikut:

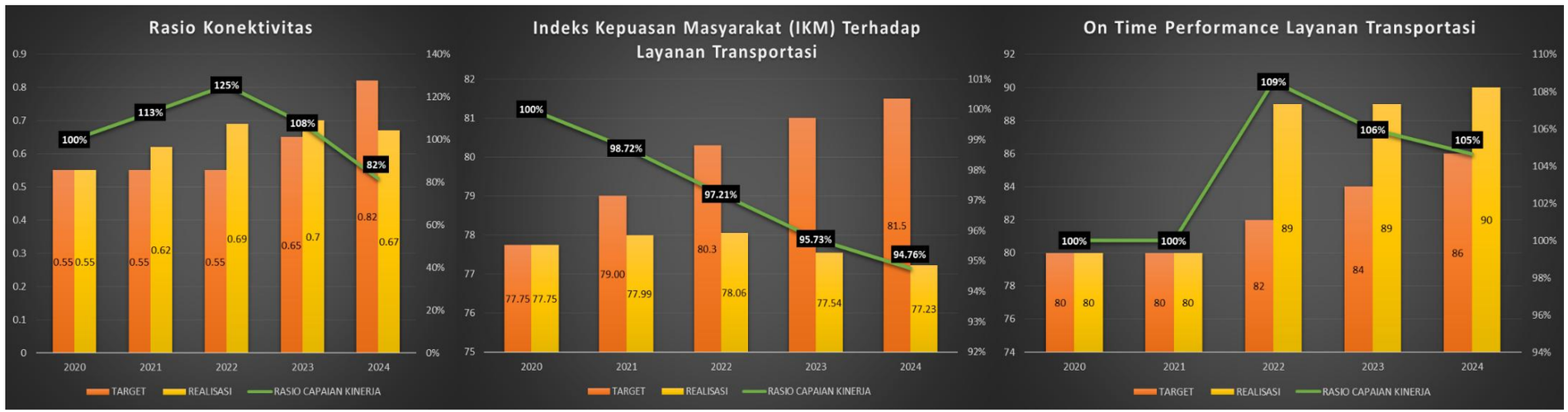
Tabel II.7 Kinerja Dinas Perhubungan 2020 sampai dengan 2024

No	Indikator	Target kinerja					Realisasi kinerja					Rasio Capaian kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Konektivitas Transportasi Antar Daerah dan Negara Tetangga	31,03	0,55	0	0	0	55	0,62	0	0	0	177%	113%	N/A	N/A	N/A
2	Rasio Konektivitas Transportasi	0	0	0,55	0,65	0,82	0	0,62	0,69	0,7	0,67	N/A	N/A	125%	108%	82%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Transportasi	0	79	80,3	81	81,5	0	77,99	78,06	77,54	77,23	N/A	99%	97%	96%	95%
4	On Time Performance Layanan Transportasi	80	80	82	84	86	80	80	89	89	90	100%	100%	109%	106%	105 %
5	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Publik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Dari tabel di atas selanjutnya akan dilakukan analisis capaian kinerja menggunakan grafik batang dan garis agar dapat memudahkan dan memberi gambaran mengenai capaian Dinas Perhubugan Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar II.2 Grafik Capaian Kinerja Dinas Perhubungan



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Rasio Konektivitas merupakan indikator untuk mengetahui tingkat konektivitas jaringan transportasi darat dan sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kewenangan provinsi. Perhitungan rasio konektivitas ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2020 dan pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Rata-rata capaian Dinas Perhubungan untuk Rasio Konektivitas dari tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah 106% yang mana rata-rata capaian ini sangat tinggi. Hal ini disebabkan adanya penyelenggaraan angkutan darat perintis oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan adanya penambahan trayek Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (ASDP). Akan tetapi pada tahun 2024 capaian rasio konektivitas ini mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu pada 82% dari tahun sebelumnya yang mencapai 108%, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat beberapa trayek angkutan perintis yang tidak beroperasi dan statusnya dicabut oleh Kemenhub dari daftar trayek perintis. Selain itu juga beberapa trayek ASDP juga belum beroperasi. Pada dasarnya rasio konektivitas ini bergantung pada penambahan jumlah trayek dan frekuensi angkutan

Kemudian pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Transportasi capaian Dinas Perhubungan Menurun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan rata-rata capaian 97,28% atau menurun 0,52 poin di tahun 2024 dari capaian 2020 yaitu 77,75. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Transportasi bertujuan untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan transportasi di Provinsi Kalimantan Utara khususnya pada simpul-simpul transportasi guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat

sebagai pengguna layanan. Tidak hanya menilai Simpul-simpul transportasi yang merupakan aset dan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, nilai IKM ini juga berasal dari penilaian simpul transportasi yang merupakan aset Pemerintah Kab/Kota, hal ini merupakan pertimbangan dan rekomendasi dari Kementerian Perhubungan yang mana untuk mengukur IKM layanan Transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Utara yaitu dengan mengukur IKM simpul transportasi yang melayani Trayek Kewenagan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu trayek Antar Kota Dalam Provinsi. Adapun penilaian, Formulasi, dan analisis IKM ini berasal dari Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Transportasi yang disusun oleh Dinas Perhubungan Provinsi yang berpedoman pada PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017. Penurunan capaian nilai IKM ini disebabkan beberapa simpul Transportasi khususnya Pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayah Kalimantan Utara masih pada tahap rehabilitasi dan pembangunan Sarana dan Prasarana pelayanan yang ada didalamnya.

Selanjutnya pada Indikator *On time Performance (OTP) ,* capaian Dinas Perhubungan pada dasarnya mengalami tren yang meningkat disetiap tahunnya, hanya saja untuk Rasio Capaian mengalami penurunan pada tahun 2024 hanya dikarenakan Target yang meningkat pada tiap tahunnya. Nilai ini diperoleh dari hasil survey Ketepatan waktu keberangkatan angkutan. Sama halnya dengan OTP, untuk Indikator Rasio Angka Kecelakaan juga tidak menggambarkan perubahan capaian yang signifikan dan dapat diasumsikan keselamatan angkutan di wilayah Kalimantan Utara masih tergolong baik.

Selain capaian Indikator-indikator diatas, terdapat realisasi dari indicator Program, Kegiatan, hingga sub kegiatan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Tabel II.8 Capaian Indikator Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan 2020 sampai dengan 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran**	100 persen									
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	2350 lembar	2350 lembar								
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	23 unit	22 unit								
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	12 bulan								
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan								
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	44 unit	44 unit								
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45000 lembar	45000 lembar								
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 jenis	6 jenis								
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 jenis	20 jenis								
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12 bulan	12 bulan								
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1860 porsi	1860 porsi								
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	95 kali	94 kali								
Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	136 kali	136 kali								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Program peningkatan sarana dan prasarana Apartur	**Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**100 persen**									
Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	150 stel	150 stel								
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang diadakan	4 unit	4 unit								
Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	25 unit	25 unit								
Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang diadakan	35 buah	35 buah								
Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah rumah/gedung/gudang parkiran kantor dinas yang disewa	3 unit	3 unit								
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yaang terpeliharanya secara rutin/berkala	23 unit	23 unit								
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	**Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100 persen**									

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	50 orang	50 orang								
Seleksi Penerimaan dan Pendidikan Taruna STTD	Jumlah taruna STTD pola pembibitan daerah	10 orang	10 orang								
Program Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi / Database Bidang Perhubungan	**Persentase Informasi/database bidang perhubungan yang tersedia**	**100**									
Penyusunan Sistem Informasi Bidang Perhubungan	Jumlah Sistem Informasi Bidang Perhubungan yang tersedia	1 web/ aplikasi	1 web/ aplikasi								
Koordinasi dalam Pembangunan Bidang Perhubungan	Jumlah Rapat Rapat Teknis Perhubungan se Kalimantan Utara	1 kegiatan	1 kegiatan								
Program Pengembangan Perhubungan Darat	**1. Angka Kecelakaan LLAJ 2.Persentase sarana dan Prasarana perhubungan darat yang dibangun**	**6,46 persen**									

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan / Fasilitas Keselamatan LLAJ	Jumlah Kegiatan Perlengkapan jalan/fasilitas keselamatan LLAJ yang dilaksananakan	18 titik/lokasi	16 titik/ lokasi								
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan Fasilitas Keselamatan LLAJ	Jumlah kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas keselamatan LLAJ	5 titik/lokasi	5 titik/ lokasi								
Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah sosialisasi/pemberian penghargaan keselamatan berlalu lintas	1 kegiatan	1 kegiatan								
Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan / Produk Hukum Bidang Perhubungan Darat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, produk hukum bidang perhubungan darat yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan								
Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Keselamatan LLAJ	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkuatan dan Keselamatan LLAJ yang terlaksana	2 kegiatan	2 kegiatan								
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi Bidang Perhubungan Darat	1 dokumen	1 dokumen								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Perhubungan Darat											
Perencanaan Bidang Perhubungan Darat	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan Darat	1 dokumen	1 dokumen								
Program Pengembangan Perhubungan Udara dan Kereta Api	**1. Angka kecelakaan transportasi udara dan kereta api 2. Persentase sarana dan Prasarana perhubungan udara dan kereta yang dibangun**	**22,63 persen**									
Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Perhubungan Udara	Jumlah Perlengkapan Fasilitas Perhubungan Udara yang diadakan	-	-								
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perhubungan Udara	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Perhubungan Udara	2 dokumen	2 dokumen								
Perencanaan Bidang Perhubungan Udara dan Kereta Api	Jumlah dokumen perencanaan bidang Perhubungan Udara	1 dokumen	1 dokumen								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Udara	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Udara yang dibangun	1 bandara/1 apter	1 bandara/ lapter								
Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Udara	Jumlah Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Udara	2 bandara lapter	2 bandara lapter								
Program Pengembangan Perhubungan Laut dan ASDP	**1. Angka kecelakaan pelayaran 2. Persentase sarana dan Prasarana perhubungan laut dan asdp yang dibangun**	**9,335 persen**									
Sosialisasi dan Penyusunan Kebijakan / Produk Hukum Bidang Perhubungan Laut dan ASDP	Jumlah Kegiatan Penyusunan Produk Hukum/ Sosialisasi Bidang Perhubungan Laut dan ASDP yang dilaksanakan	2 kegiatan	1 kegiatan								
Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Perairan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Perairan	1 kegiatan	1 kegiatan								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perhubungan Laut dan ASDP	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi bidang perhubungan laut dan ASDP	1 dokumen	1 dokumen								
Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah	1 kegiatan	-								
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Jumlah sertifikat pengadaan tanah	1 dokumen	-								
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan ASDP	Jumlah sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan ASDP yang dibangun	2 pelabuhan	2 pelabuhan								
Perencanaan Bidang Perhubungan Laut dan ASDP	Jumlah dokumen perencanaan bidang perhubungan laut dan ASDP	3 dokumen	3 dokumen								
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan ASDP	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan ASPD yang dilaksanakan	1 pelabuhan	1 pelabuhan								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup Dinas Perhubungan**					**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun dan Dievaluasi							2 Dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di evaluasi					4 Dokumen	4 Dokumen	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan					12 Bulan	12 Bulan	81 orang/bulan	81 orang/bulan	83 orang/bulan	83 orang/bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honorarium penanggungjawab pengelola keuangan yang disediakan					12 Bulan	12 Bulan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah									12 laporan	12 laporan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai yang diikuti					33 Kali	4 Kali	8 orang	8 orang	5 orang	5 orang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					3 Jenis	3 Jenis	3 pelabuhan	3 pelabuhan	2 paket	2 paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan							2 jenis	2 jenis		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan					12 Bulan	12 Bulan	3 paket	3 paket	12 paket	12 paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					22100 Lembar	22100 Lembar	2 paket	2 paket	12 paket	12 paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan					307 Kali	307 Kali	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan									3 unit	3 unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan					1 Unit	1 Unit	5 unit	5 unit	1 unit	1 unit
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia					1000 Lembar	1000 Lembar	12 bulan	12 bulan	12 laporan	12 laporan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan					12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 laporan	12 laporan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara					25 Unit	25 Unit	25 unit	25 unit	9 unit	9 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					49 Unit	49 Unit	0 Unit	0 Unit	11 unit	11 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara					3 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	3 unit	3 unit
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia**					**42 Persen**	**42 Persen**	**43,5 Persen**	**43,5 Persen**	**75 Persen**	**75 Persen**
	Persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi					**25 Persen**	**25 Persen**	**25 Persen**	**25 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
Penyediaan Perlengkapan	Jumlah titik yang disediakan Perlengkapan Jalannya					64 Tititk/Lokasi	64 Tititk/Lokasi	64 Tititk/Lokasi	64 Tititk/Lokasi	64 unit	64 unit

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Jalan di Jalan Provinsi											
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara							5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Yang disusun					1 Dokumen	0 Dokumen				
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah titik dilakukan pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi					1 Laporan	1 Laporan	4 laporan	4 laporan	2 laporan	2 laporan
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan									20 unit	20 unit
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin yang terlaksana					1 Kegiatan	1 Kegiatan			3 laporan	3 laporan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi							1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi							2 laporan	2 laporan		
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi							4 laporan	4 laporan		
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi					1 Laporan	1 Laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi yang disosialisasikan/diujicobakan					1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilaah Operasinya Kewenangan Provinsi							1 laporan	1 laporan		
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi									1 dokumen	1 dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi**					**57 Persen**	**57 Persen**	**28 Persen**	**28 Persen**	**33 Persen**	**33 Persen**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	persentase fasilitas keselamatan pelayaran yang tersedia					**25 Persen**	**25 Persen**	**57,58 Persen**	**57,58 Persen**	**57,58 Persen**	**57,58 Persen**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan koordinasi/sinkronisasi /pengawasan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi					2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 laporan	2 laporan		
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					3 Laporan	3 Laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen pendukung pembangunan yang tersusun					1 Dokumen	0 Dokumen				
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen pendukung pembangunan yang tersusun					1 Dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	0 dokumen	1 unit	1 unit
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan pengumpan regional di provinsi Kalimantan Utara yang dibangun					1 Pelabuhan	1 Pelabuhan	3 unit	0 unit		
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan	Jumlah laporan Pengawasan Pengoperasian					1 Laporan	1 Laporan	4 laporan	0 unit		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Regional										
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi							1 dokumen	1 dokumen		
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional dan terpelihara							2 unit	2 unit	2 unit	2 unit

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel II.9 Kinerja Dinas Perhubungan 2020 sampai dengan 2024

No	Jenis Belanja/Program	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasidan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	PELAYANAN ADMIMNISTRASI PERKANTORAN	Rp8.025.178.124					Rp6.426.436.678					**78,0%**	**98,5%**	**94,4%**	**84,7%**	**87,7%**
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp2.119.933.000					Rp2.035.950.613									
3	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp566.000.000					Rp514.855.354									
4	PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE PERHUBUNGAN	Rp854.189.180					Rp821.628.023									

No	Jenis Belanja/Program	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasidan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5	PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DARAT	Rp4.507.000.700					Rp3.880.282.769									
6	PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN UDARA DAN KERETA API	Rp18.820.520.253					Rp15.187.574.856									
7	PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT & ASDP	Rp27.582.021.068					Rp19.134.994.215									
8	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Rp18.186.869.292	Rp14.260.438.438	Rp14.758.713.446	Rp18.539.366.589		Rp14.374.147.182	Rp13.591.055.687	Rp14.305.604.822	Rp17.434.034.987					

No	Jenis Belanja/Program	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasidan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
9	LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN		Rp14.260.438.438	Rp 2.996.706.570	Rp 3.919.380.959	Rp 1.818.793.862		Rp17.778.553.499	Rp 2.649.260.791	Rp 3.888.309.231	Rp 1.807.010.244					
10	PENGELOLAAN PELAYARAN		Rp17.124.781.851	Rp 4.737.314.620	Rp13.675.837.999	Rp24.666.652.420		Rp16.690.783.877	Rp 4.528.305.428	Rp 9.206.348.333	Rp20.236.198.993					
11	PERKERETAAPIAN		Rp204.464.000					Rp186.938.849								
12	PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH PEMBANGUNAN		Rp950.000.000					Rp937.605.028								

No	Jenis Belanja/Program	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasidan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
13	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp4.216.882.335					Rp4.050.437.785									
JUMLAH		Rp66.691.724.660	Rp50.726.553.581	Rp21.994.459.628	Rp32.353.932.404	Rp45.024.812.871	Rp52.052.160.293	Rp49.968.028.435	Rp20.768.621.906	Rp27.400.262.386	Rp39.477.244.224					

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Gambar II.3 Grafik Presentase Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat presentase realisasi anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yaitu 88%, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 yaitu 98,50%. Realisasi anggaran ini sangat bergantung pada realisasi kinerja pada kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara sampai pada level pelaksanaan Sub Kegiatan. Mayoritas adanya anggaran yang tidak terealisasi adalah pekerjaan yang selesai tidak tepat waktu, sampai dengan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena minimnya waktu pekerjaan. Selain itu ada juga beberapa kegiatan yang selesai tanpa menggunakan 100% anggaran yang direncanakan.

Selama priode kinerja Dinas Perhuhungan dalam 5 tahun kebelakang, terdapat beberapa pencapaian yang telah didapatkan yaitu:

1. Terlaksananya operasional kapal Rede Trayek Tarakan – Ancam pada tahun 2024 dengan subsidi penuh oleh Pemerintah Pusat. Hal ini merupakan inisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Operasional kapal Rede ini memberi dampak positif pada saat resmi beroperasi kepada Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara khususnya pada Masyarakat 3 Kabupaten yaitu Malinau, Tana Tidung, dan Bulungan. Diharapkan dengan beroperasinya kapal Rede ini dapat menstimulasi perputaran ekonomi Masyarakat.
2. Terdapat 3 Trayek Angkutan Darat dan 11 Trayek Angkutan Sungai, Danau Dan Penyebrangan yang melayani kebutuhan mobilitas Masyarakat Kalimantan Utara
3. Tersedianya angkutan mudik gratis via angkutan darat melalui Kerjasama dengan DAMRI selaku operator angkutan.
4. Pengembalian status Bandara Juwata Tarakan menjadi Bandara Internasional. Dinas Perhubungan selaku *leading sector* urusan Transportasi melakukan koordinasi dan konsultansi kepada pihak terkait dalam rangka pengembalian status Bandara ini. Dampak yang akan

dirasakan ketika pengembalian status Bandara ini yaitu membuka aksesibilitas wilayah Kalimantan Utara langsung dengan Negara tetangga. Diharapkan nantinya Kalimantan Utara akan menjadi salah satu gerbang utama Negara Republik Indonesia di bagian utara Kalimantan.

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2025-2029.

Tabel II.10 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

No.	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Lalulintas dan Angkutan Jalan	Perizinan Angkutan Umum dan Angkutan Sewa Khusus	Pelaku Usaha baik perorangan maupun badan usaha
		Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi Angkutan Darat	Masyarakat pengguna Layanan Transportasi
		Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Masyarakat pengguna Layanan Transportasi
		Penerbitan Pertimbangan Teknis Andalalin	Pemerintah dan Pelaku Usaha. Baik perorangan maupun badan usaha
2	Pelayaran	Perizinan Jasa Angkutan dan Jasa Kepelabuhanan	Pelaku Usaha baik perorangan maupun badan usaha Pengguna Jasa Angkutan Pengguna Jasa Pelabuhan
		Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi Angkutan Perairan	Masyarakat pengguna layanan Transportasi
		Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelabuhan	Pemerintah dan Pengguna Layanan Transportasi
3	Pengembangan Transportasi	Penyusunan Kebijakan Transportasi	Masyarakat pengguna Layanan Transportasi

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

2.6 Mitra Dinas Perhubungan Dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Transportasi. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara:

Tabel II.11 Jenis layanan mitra Dinas Perhubungan

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kementerian Perhubungan	Audit Dan Inspeksi Jalan	Melaksanakan Pengawasan Angkutan Jalan untuk pencegahan kerusakan jalan yang disebabkan kendaraan ODOL
		Penyedian Angkutan Perintis Darat	Penyediaan Angkutan Perintis Bersubsidi dengan Operator Pelaksana Perum DAMRI
		Penyediaan Angkutan Perintis Penyebrangan	Penyediaan Angkutan Perintis Yang Bersubsidi dengan Operator Pelaksana PT. ASDP Dan PT. PELNI
2	Kemenhub, KSOP, Jasa Raharja, Dan Kepolisian	Ramphcek Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru	Melaksanakan Pengawasan Kelaikan Jalan Angkutan Umum, Khususnya AKDP
3	DPMPTSP Provinsi	Pertimbangan Teknis Izin Angkutan	Penertiban Izin, dari Pertimbangan Teknis Yang telah Diterbitkan

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
4	DPUPR	Pemantapan Jalan	Penyediaan Jalan Dalam Kondisi Mantap
5	BAPENDA	Pungutan Retribusi	Penentuan Target Dan Pengawasan Pemungutan Retribusi
6	BAPPEDA	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Verifikasi dan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7	Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota	Sinkronisasi Kebijakan Transportasi	Sinkronisasi Data dan Koordinasi Kebijakan Transportasi

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara pada dasarnya memiliki kemitraan dengan Instansi, Badan, hingga Instansi Pertahan Negara untuk melaksanakan pelayanan Perhubungan kepada masyarakat. Tetapi terdapat tiga Mitra Perangkat Daerah yang memiliki kemitraan yang rutin dijalankan untuk pemenuhan pelayanan. Pada Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan sinergi kelembagaan dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan transportasi di wilayah Kalimantan Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara menjalin kerja sama yang erat dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan, yang meliputi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU). Dimana masing-masing UPT merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan masing-masing tugas dan fungsinya. Kerja sama ini dititik beratkan pada pelayanan penyediaan angkutan dan pengawasan keselamatan angkutan.

Kemudian pada kegiatan pengawasan keselamatan Transportasi pada saat momen-momen hari besar juga dilaksanakan kemitraan unutk mewujudkan keselamatan angkutan pada saat *Peak demand* Transportasi.

Selanjutnya pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berpaku pada penyediaan, pengawasan, serta peningkatan layanan Transportasi, Dinas Perhubungan juga melaksanakan kemitraan antar Intansi Pemerintah Provinsi yaitu DPMPTSP dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan angkutan untuk operator-operator angkutan Swasta maupun BUMN.

2.7 Permasalahan Pelayananan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan

proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel II.12 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Kualitas Layanan Transportasi Yang Berkeselamatan	Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas	Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Pelabuhan Tidak maksimal
			Tidak adanya Pelabuhan Barang yang menjadi Aset Provinsi
			Standar Pelayanan di Pelabuhan Tidak Tercapai
			Belum Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan Yang Memadai
			Belum tersedianya terminal tipe B
			Kurangnya perlengkapan jalan
		Belum dilaksanakannya Digitalisasi Produk Transportasi	Database Perhubungan kurang tertata (data spasial)
			Sistem Informasi yang belum terintegrasi
			Belum tersedianya *Intelligence Transport System* (ITS)
		Belum Terlaksananya Pengendalian Dan Pengawasan Angkutan secara Berkala	Pengawasan dan Izin ASK belum tertib
			Kendaraan ODOL masih beroperasi
			Speed tidak berizin dan sesuai SPM masih beroperasi
			Pengawasan Keselamatan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan masih kurang
			Indikator On Time Performance sulit diukur
			Penegakan sertifikasi awak kapal
			Kurangnya Sosialisasi Keselamatan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Kurangnya SDM Perhubungan yang Bersertifikasi	Kompetensi SDM Kepelabuhanan Kurang terampil
			Tidak Tersedianya SDM Pemeriksa angkutan jalan yang bersertifikasi
			Tidak Tersedianya SDM Pemeliharaan perlengkapan jalan yang bersertifikasi
2	Rendahnya konektivitas antar wilayah	Konektivitas antar wilayah hanya terbatas pada pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan dan Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Pelabuhan Bulungan, KTT dan Malinau tidak dapat dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi sebab merupakan aset kabupaten
			Pembangunan Pelabuhan Regional di Bulungan, KTT dan Malinau belum dilaksanakan sebab akan menimbulkan persaingan dengan pelabuhan existing yang dikelola pemerintah kabupaten

Sumber : Hasil Analisi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan. Adapun teknik analisis permaslahan di atas yaitu mengindentifikasikan permasalahan sampai dengan permasalahan operasional lapangan sesuai dengan bidang urusan teknis pada Dinas Perhubungan, dari Kepelabuhanan, Angkutan, Sungai, Danau, Dan Penyebrangan, Angkutan Jalan, Lalu Lintas, Keperintisan dan Multimoda, hingga Kepegawaian yang di dalamnya dibahas permasalahan Barang Milik Daerah (BMD) dan aset.

2.8 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, KLHS RPJMD, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian sebagai berikut:

2.8.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. **Perkembangan demografi global**
   Perkembangan/perubahan demografi global melibatkan perubahan struktur populasi manusia di seluruh dunia. perubahan ini mencakup banyak aspek, tetapi yang berkaitan dengan tantangan untuk sektor transportasi adalah pertumbuhan populasi, urbanisasi, migrasi, dan kepadatan penduduk. Perkembangan faktor-faktor tersebut selaras dengan Demand Transportasi yang meningkat. Hal ini menyebabkan perlu adanya perhatian pada peningkatan infrastruktur transportasi hingga permasalahan kemacetan
2. **Dinamika geopolitik dan geoekonomi global**
   Mendukung kebijakan luar negeri terkait dengan mobilisasi dan tata letak geografis wilayah yang berbatasan dengan Negara tetangga
3. **Peningkatan urbanisasi dunia**
   Hal ini erat kaitannya dengan perpindahan penduduk umumnya dari daerah pedesaan ke perkotaan. Maka tantangan yang akan dihadapi yaitu demand angkutan yang bertambah, kepadatan lalulintas, perlunya infrastruktur transportasi yang dikarenakan ketidakmampuan menampung jumlah pengguna jasa yang besar
4. **Perkembangan teknologi**
   Perkembangan teknologi yang berfokus pada teknologi transportasi, mulai dari kemudahan mendapatkan layanan, perkembangan kualitas layanan, hingga peningkatan keselamatan transportasi.

2.8.2 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementeian Perhubungan merupakan bagian integral dari isu nasional yang bersumber dari kebijakan, program prioritas, dan arah strategis nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan fokus kerja sektoral yang memiliki implikasi terhadap pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar mendukung pencapaian sasaran strategis nasional.

Pada saat penyusunan Renstra Dinas Perhubungan 2025-2029 dilakukan, Renstra Kementrian Perhubungan belum ditetapkan. Oleh sebab itu tidak dapat dilakukan telaahan Renstra Kementrian Perhubungan 2025-2029.

2.8.3 Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini memberikan dasar bagi kebijakan dan program pembangunan daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Oleh karena itu, isu-isu dalam KLHS RPJMD perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Isu-isu strategis yang relevan dengan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara antara lain:

1. **Peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar**

   Layanan dasar yang dimaksudkan disini adalah pendidikan dan kesehatan. Sektor pendidikan dan kesehatan adalah sektor strategis yang menjadi penentu tingkat kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sering kali dinilai dari baik tidaknya kinerja dari kedua sektor ini.

   Adapun dari sektor transportasi, peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar merupakan bagian penting dari pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan aksesibilitas, keterjangkauan, keamanan, kenyamanan, dan efisiensi sistem transportasi bagi seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun di wilayah terpencil

2. **Pengelolaan Kawasan perbatasan yang belum optimal**

   Isu ini merupakan hasil penggabungan dari isu Maraknya aktivitas ilegal di kawasan perbatasan

negara; dan Tingginya tingkat ketergantungan penduduk di kawasan perbatasan terhadap kebutuhan bahan pokok dan kegiatan ekonomi pada negara tetangga. Pengelolaan kawasan perbatasan pada sektor transportasi hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan layanan belum optimal. Keterbatasan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan sarana transportasi umum menyebabkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang di wilayah perbatasan terganggu. Selain itu, minimnya integrasi antar moda transportasi dan kurangnya konektivitas dengan pusat-pusat ekonomi di dalam negeri maupun negara tetangga menghambat potensi kawasan perbatasan sebagai gerbang perdagangan dan pertumbuhan. Untuk itu, dibutuhkan perencanaan terpadu, peningkatan investasi infrastruktur, serta kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan transportasi yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan di wilayah perbatasan.

2.8.4 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Dinas Perhubungan agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan adalah **“Konektivitas wilayah dan aksesibilitas layanan Dasar yang merata dan berkeadilan”,** yang mana belum optimalnya pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas layanan dasar yang merata dan berkeadilan.

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis Dinas Perhubungan secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, KLHS RPJMD, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.13 Penentuan Isu Strategis Dinas Pehubungan

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD				Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	Provinsi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)
1. Transportasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilisasi antar daerah dalam provinsi 2. Pengembangan Digitalisasi Transportasi 3.Potensi bonus demografi	Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas	1. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar 2.Pengelolaan Kawasan perbatasan yang belum optimal	1. Perkembangan demografi global 2.Dinamika geopolitik dan geoekonomi global 3. Peningkatan urbanisasi dunia 4. Perkembangan teknologi	1.Rendahnya produktivitas	Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar yang memenuhi SPM	Konektivitas wilayah dan aksesibilitas layanan dasar yang merata dan berkeadilan	1.Keterbatasan kewenangan
	Belum dilaksanakannya Digitalisasi Produk Transportasi						2. Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Transportasi yang Belum Memadai
	Belum Terlaksananya Pengendalian Dan Pengawasan Angkutan secara Berkala						3.Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan Angkutan
	Kurangnya SDM Perhubungan yang Bersertifikasi						4.belum optimalnya penyediaan data dan informasi bidang perhubungan
	Konektivitas antar wilayah hanya terbatas pada pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan dan Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan						5.Pengelolaan Aset Belum Optimal
							6. Kompetensi SDM bidang Perhubungan belum terpenuhi

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Dinas Perhubungan. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Dinas Perhubungan. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara disajikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan kewenangan
2. Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Transportasi yang Belum Memadai
3. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan Angkutan
4. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi bidang perhubungan
5. Pengelolaan Aset Belum Optimal
6. Kompetensi SDM bidang Perhubungan belum terpenuhi

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KERJAAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi yang berkeselamatan sebagai bagian dari upaya mendorong konektivitas wilayah, memperkuat daya saing daerah, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan geografis dan dinamika pertumbuhan wilayah, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara berfokus pada penguatan infrastruktur, penerapan teknologi transportasi, serta peningkatan budaya keselamatan dan pelayanan publik. Tujuan ini tidak hanya untuk menjamin mobilitas yang aman dan efisien, tetapi juga menjadi fondasi bagi pemerataan pembangunan, integrasi antarwilayah, dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. Demi untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan tersebut terdapat dua sasaran utama yang menjadi fokus arah kebijakan dalam menjalankan fungsi organisasi Dinas Perhubungan yaitu Meningkatkan Keterhubungan Wilayah Dengan Transportasi Umum dan Meningkatnya Keselamatan Transportasi. Dua hal ini merupakan hal-hal yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan sudah sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Utara. Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Utara, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Gubernur Kalimantan Utara yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan”

Adapun misi Gubernur Kalimantan Utara dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif
4. Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
7. Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas

Dari 8 (Delapan) misi di atas, setiap Perangkat Daerah (PD) mendukung semua misi Gubernur Kalimantan Utara. Dalam perjalanannya visi dan misi ini memiliki beberapa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang tercantum pada dokumen RPJMD Kalimantan Utara. Adapun tujuan yang diamanatkan kepada Dinas Perhubungan yaitu **meningkatnya Daya Saing Daerah** dengan sasaran **dukungan infrastruktur yang merata, berkeadilan dan berkualitas.** Selain Tujuan dan Sasaran RPJMD yang akan diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Perhubungan, terdapat 8 program unggulan Kepala Daerah yang juga sebagai pendukung untuk

menyusun sebuah konsep tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Dari 8 Program unggulan Dinas Perhubungan berperan pada Program Unggulan ke-7 yaitu **Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara.** Berikut penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran RPJMD: Dukungan infrastruktur yang merata, berkeadilan dan berkualitas	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah		Rasio Konektivitas	0,13	0,27	0,40	0,47	0,75	1	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Transportasi	77,25	77,30	77,40	77,45	78,00	78,20	
		Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prersentase Keselamatan Transportasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Dalam Menentukan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan mempertimbangkan langkah-langkah yang komperhensif berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, strategi Dinas Perhubungan juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan juga menjadikan rumusan masalah yang telah disusun sesuai dengan akar masalah yang ada di lingkup dinas perhubungan sebagai refrensi untuk langkah konkret apa yang akan dilaksanakan. Berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel III.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan

RUMUSAN MASALAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
(1)	(2)	(3)
Belum Optimalnya Kondisi Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kepelabuhanan	Melaksanakan Koordinasi dan Pembahasan terkait dengan kewenangan menjalankan urusan perhubungan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan	Melaksanakan koordinasi terkait Pelimpahan Aset Pelabuhan Kewenangan Provinsi
	Menyediakan dan Meningkatkan Kondisi Sarana Dan Prasarana Transportasi Perairan	Peningkatan Sarana,Prasarana Serta Standar pelayanan Kepelabuhanan
		Pembangunan Pelabuhan sesuai Kewenangan Daerah
Belum Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan Yang Memadai	Menyediakan dan Meningkatkan Kondisi Sarana Dan Prasarana Transportasi Jalan	Penyediaan Prasarana Simpul Transportasi Jalan
		Peningkatan fasilitas Keselamatan Jalanan
Belum dilaksanakannya Digitalisasi Produk Transportasi	Meningkatkan Digitalisasi layanan Perhubungan	Percepatan Transformasi Digitalisasi layanan Perhubungan
Belum Terlaksananya Pengendalian Dan Pengawasan Angkutan secara Berkala	Mengoptimalkan Pengendalian Dan Pengawasan Angkutan	Peningkatan pengendalian dan pengawasan Angkutan
Kurangnya SDM Perhubungan Yang Bersertifikasi	Meningkatkan Kompetensi SDM Perhubungan dengan memperhatikan kebutuhan Kompetensi tekhnis	Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perhubungan
Kewenangan Angkutan Penerbangan Tidak Berada pada Pemerintah Daerah	Mengoptimalkan Koordinasi dan Fasilitasi Angkutan Udara antara Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat	Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Dan Operasional Bandara

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

3.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

Tabel III.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembangunan Sarana, prasarana transportasi dan fasilitas Keselamatan Angkutan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis inklusif	Pemerataaan akses transportasi di wilayah Kalimantan Utara	Peningkatan SDM Bidang Perhubungan dalam meningkatkan nilai tambah layanan transportasi di wilayah Kalimantan Utara	Peningkatan Tata Kelola Layanan Perhubungan	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Layanan Transportasi berbasis digitalisasi menuju Kalimantan Utara sebagai beranda depan NKRI yang berdaya saing

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perhubungan disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas Perhubungan, yang merupakan hasil dari cascading tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian outcome dan output yang diharapkan.

Tabel IV.1 Cascading Perumusan Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Dukungan infrastruktur yang merata, berkeadilan dan berkualitas	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah				Rasio Konektivitas		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Transportasi		
		Meningkatnya Keselamatan Transportasi			Prersentase Keselamatan Transportasi		
Dinas Perhubungan (Induk)							
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah		**Presentase Pemenuhan Layanan Kinerja Administrasi Perangkat Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	
			Miningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai standar regulasi	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengaggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terselenggaranya walidata pendukung statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai regulasi	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya Administrasi Pelayanan Pendapatan Retribusi Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Sesuai Standar Peraturan Yang Berlaku	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Standar**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Layanan**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penataan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Penataan Arsip Dinamis Pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Regulasi	**Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Menigkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
				BMD yang terpelihara	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Layanan		**Rasio Konektivitas Transportasi Darat**	**PROGRAM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Transportasi Darat		**Presentase Kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi Ideal**		
				Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	**Jumlah Dokumen Rencana Induk LLAJ Provinsi**	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	
				Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	
				Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	
				Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	
				Meningkatnya Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Pada	**Jumlah Kelengkapan Jalan Yang Terpasang dan Terpelihara**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jalan Provinsi Dengan Kondisi Ideal			
				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Terlaksananya Rencana Pengelolaan Terminal Tipe B	**Jumlah Terminal Tipe B yang dikelola**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	
				Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	
				Terbangunnya Terminal Tipe B yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	
				Meningkatnya Pengawasan Keselamatan Jalan Provinsi	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan Jalan**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Tersusunnya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi	**Jumlah Laporan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
				Meningkatkan Standar Keselamatan Transportasi Darat	**Jumlah Laporan Moda Transportasi Darat Yang Laik Jalan**	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	
				Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
				Tersedianya Pelayanan Angkutan Darat	**Jumlah Trayek Transportasi Darat**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terkendalinya dan Terawasinya KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	
				Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Tersedianya Pelayanan Angkutan Darat	**Jumlah dokumen rencana umum jaringan Trayek Transportasi Darat**	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
				Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Antarkota Kewenangan Provinsi		
				Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	
				Meningkatnya Kualitas Izin Angkutan Darat	**Jumlah Kartu Pengawasan Yang diterbitkan Sesuai Dengan Ketentuan**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	
				Tersedianya Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Meningkatnya Layanan		**Rasio Konektivitas Transportasi Perairan**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Transportasi Perairan		**Presentase Kecelakaan Angkutan Perairan**		
				Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut	**Jumlah Penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) Izin Usaha Angkutan Laut Yang Sesuai Dengan Ketentuan**	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasa Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	
				Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau	**Jumlah Penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau Yang Sesuai Dengan Ketentuan**	**Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi Syarat Perizinan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	
				Tersedianya Pelayanan Transportasi Perairan	**Jumlah Trayek Transportasi Perairan**	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	
				Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau Dan Penyebrangan Dan Jumlah Laporan Pengendalian Dan Pengawasan Izin Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyebrangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kab/Kota Dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau Dan Penyebrangan Dan persetujan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyebrangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Usaha Jasa Kepelabuhanan	**Jumlah Penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) Izin Usaha Jasa Kepelabuhanan Yang Sesuai Dengan Ketentuan**	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	
				Tersedianya Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Serizinan	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	
				Tersusunnya Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	**Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	
				Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	**Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuha Pengumpan Regional**	
				Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	
				Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	
				Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional	**Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional Yang Dikelola**	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional'**	
				Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	
				Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	
				Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	
				Tersedianya Simpul-Simpul Transportasi Sungai dan Danau	**Jumlah Simpul Transportasi Perairan Sungai dan Danau**	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	
				Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	**Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk**	**Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pelabuhan Pengumpan Regional		
				Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
UPTD PELABUHAN TENGKAYU I TARAKAN							
			Meningkatnya Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daearah Di Lingkup UPTD Tengkayu I Tarakan		**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup UPTD Tengkayu I Tarakan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai standar regulasi	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengaggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai regulasi	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya Administrasi Pelayanan Pendapatan Retribusi Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Sesuai Standar Peraturan Yang Berlaku	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Standar**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Layanan**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Penyedia Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Regulasi	**Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan mesin dan lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Menigkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				BMD yang terpelihara	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan Rehabilitasi/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan Rehabilitasi/ Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN							
			Meningkatnya Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daearah Di Lingkup UPTD Liem Hie		**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup UPTD Liem Hie Djung Nunukan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai regulasi	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Djung Nunukan		**Perangkat Daerah yang disusun**		
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Sesuai Standar Peraturan Yang Berlaku	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Standar**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Layanan**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Penyedia Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Regulasi	**Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan mesin dan lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Menigkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				BMD yang terpelihara	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan Rehabilitasi/ Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:

Tabel IV.2 Pagu Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Beserta UPTD Pelabuhan

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	URUSAN PERHUBUNGAN				**29.917.513.778**		**61.334.827.868**		**61.558.208.397**		**71.037.501.938**		**64.951.501.938**	
	DINAS PERHUBUNGAN				**23.177.903.809**		**52.848.783.880,71**		**52.137.458.352**		**61.660.462.384**		**55.461.762.384**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**16.555.767.948**		**16.891.281.092,04**		**18.349.788.967**		**17.800.462.384**		**17.651.762.384**	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Kinerja Administrasi Perangkat Daerah		100%		100%		100%		100%		100%		
	Miningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,36	86,15		86,50		87,00		88,00		88,15		

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**605.963.019,00**		**515.000.000,00**		**700.000.000,00**		**1.050.000.000,00**		**1.000.000.000,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai standar regulasi	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengaggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**											
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	96.479.645,00	2 Dokumen	75.000.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Dokumen Renja, Renstra

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	310.951.450,00	4 Laporan	200.000.000,00	4 Laporan	200.000.000,00	4 Laporan	300.000.000,00	4 Laporan	300.000.000,00	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKJiP, LPPD, LKPJ, Laporan Survey IKM)
2.15.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	12 Data	42.785.000,00	12 Data	50.000.000,00	12 Data	75.000.000,00	12 Data	100.000.000,00	12 Data	100.000.000,00	Pengumpulan Data Statistik Sektoral

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah													
	Terselenggaranya walidata pendukung statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	0	2 Dokumen	36.646.924,00	2 Dokumen	40.000.000,00	2 Dokumen	75.000.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00	Pengumpulan Data Statistik Sektoral
2.15.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan													

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0	1 Berita Acara	119.100.000,00	1 Berita Acara	150.000.000,00	1 Berita Acara	250.000.000,00	1 Berita Acara	350.000.000,00	1 Berita Acara	300.000.000,00	Berita Acara Rakorte krenbang
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**13.772.080.165,00**		**14.311.956.708,04**		**14.500.000.000,00**		**14.500.000.000,00**		**14.500.000.000,00**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai regulasi	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**Dokumen**											

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/ Bulan	207 Orang /Bulan	13.342.284.693,00	207 Orang /Bulan	13.861.956.708,04	207 Orang /Bulan	14.000.000.000,00	207 Orang /Bulan	14.000.000.000,00	207 Orang /Bulan	14.000.000.000,00	Gaji ASN (PNS dan PPPK) termasuk UPTD didalamnya
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	429.795.472,00	12 Dokumen	450.000.000,00	12 Dokumen	500.000.000,00	12 Dokumen	500.000.000,00	12 Dokumen	500.000.000,00	Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Gaji PTT
2.15.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**				**80.005.000,00**		**80.000.000,00**		**80.000.000,00**		**80.000.000,00**		**80.000.000,00**	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Meningkatnya Administrasi Pelayanan Pendapatan Retribusi Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Laporan**											
2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah													
	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	80.005.000,00	12 Laporan	80.000.000,00	12 Laporan	80.000.000,00	12 Laporan	80.000.000,00	12 Laporan	80.000.000,00	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
2.15.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**241.000.000,00**		**110.000.000,00**		**100.000.000,00**		**156.000.000,00**		**156.000.000,00**	
	Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Sesuai Standar Peraturan Yang Berlaku	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Standar**	**Persen**											

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya													
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	90 Paket	85.000.000,00	5 Paket	10.000.000							Pengadaan Pakaian Dinas
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 orang	156.000.000,00	4 orang	100.000.000	4 orang	100.000.000	4 orang	156.000.000,00	4 orang	156.000.000,00	Diklat dan Beasiswa
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1.175.616.768,00**		**1.052.409.388,00**		**1.295.073.970,76**		**1.423.677.388,00**		**1.423.677.388,00**	
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi	**Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat**	**Persen**											

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Umum Perangkat Daerah	**Daerah Yang Sesuai Standar Layanan**												
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3 paket	8.268.000,00	3 paket	10.000.000	3 paket	10.000.000	3 paket	10.000.000,00	3 paket	10.000.000,00	Komponen Instalasi Listrik
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 paket	10.000.000,00	12 paket	10.000.000	12 paket	10.000.000	12 paket	10.000.000,00	12 paket	10.000.000,00	Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket	14.300.000,00	1 paket	10.000.000	1 paket	16.200.000	1 paket	16.200.000,00	1 paket	16.200.000,00	Peralatan Rumah Tangga
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 paket	165.639.380,00	12 paket	170.000.000	12 paket	170.000.000	12 paket	170.000.000	12 paket	170.000.000	Bahan Logistik Kantor
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 paket	101.209.388,00	12 paket	101.209.388	12 paket	101.209.388,00	12 paket	101.209.388,00	12 paket	101.209.388,00	Barang Cetakan dan Penggandaan

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
	Tesedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan		12 Dokumen	1.200.000,00	12 Dokumen	1.200.000,00	12 Dokumen	1.200.000,00	12 Dokumen	1.200.000,00	12 Dokumen	1.200.000,00	Barang Cetakan dan Penggandaan
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	825.000.000,00	212 Paket	700.000.000	12 Laporan	936.464.582,76	12 Laporan	1.065.068.000,00	12 Laporan	1.065.068.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.06.0010	Penataan Arsip Dinamis Pada SKPD													
	Terlaksananya Penataan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		4 Dokumen	50.000.000,00	4 Dokumen	50.000.000,00	4 Dokumen	50.000.000,00	4 Dokumen	50.000.000,00	4 Dokumen	50.000.000,00	
2.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**281.150.000,00**		**515.000.000,00**		**1.355.800.000,00**		**236.100.000,00**		**137.400.000,00**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Regulasi	**Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan**												

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	24 Unit			1 unit	35.000.000,00	4 unit	1.200.000.000,00	1 unit	35.000.000,00			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	-	1 unit	450.000.000,00							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		12 Paket	133.650.000,00			6 Paket	64.000.000,00					Pengadaan Mebel
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	12 Unit	147.500.000,00	3 unit	30.000.000,00	6 unit	91.800.000,00	11 unit	201.100.000,00	8 unit	137.400.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Laporan**		**89.768.000,00**		**58.000.000,00**		**58.000.000,00**		**58.000.000,00**		**58.000.000,00**	
	Menigkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**												

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	13.000.000,00	12 laporan	13.000.000,00	12 laporan	13.000.000,00	12 laporan	13.000.000,00	12 laporan	13.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	76.768.000,00	12 laporan	45.000.000,00	12 laporan	45.000.000,00	12 laporan	45.000.000,00	12 laporan	45.000.000,00	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**310.184.996,00**		**248.914.996,00**		**260.914.996,00**		**296.684.996,00**		**296.684.996,00**	
	BMD yang terpelihara	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara**												

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	24 Unit	24 Unit	147.770.000,00	24 Unit	100.000.000,00	24 Unit	100.000.000,00	24 Unit	147.770.000,00	24 Unit	147.770.000,00	Pemeliharaan Kendaraan, BBM dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	89.845.000,00	5 Unit	89.845.000,00	6 Unit	89.845.000,00	6 Unit	89.845.000,00	6 Unit	89.845.000,00	Pemeliharaan Kendaraan, BBM dan Pajak Kendaraan Operasional atau lapangan
2.15.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	0	5 Unit	13.500.000,00	0	-	24	12.000.000,00	0	-	0	-	Pemeliharaan Mebel

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	17 unit	28.000.000,00	17 unit	28.000.000,00	17 unit	28.000.000,00	17 unit	28.000.000,00	17 unit	28.000.000,00	Pemeliharaan AC, Laptop, Komputer dan Printer
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1 unit	31.069.996,00	1 unit	31.069.996,00	1 unit	31.069.996,00	1 unit	31.069.996,00	1 unit	31.069.996,00	Belanja Alat Pembersih Kantor

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02	**PROGRAM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN**				**3.486.076.402**		**12.720.162.483,56**		**13.084.725.665**		**13.900.000.000**		**13.850.000.000**	
	Meningkatnya Layanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	0	0		0		0		0,5		1		
		Persentase Keselamatan AKDP	95,43%	100%		100%		100%		100%		100%		
2.15.02.1.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**		**0 Dokumen**		**-**		**800.000.000,00**		**500.000.000,00**		**400.000.000,00**		**-**	
	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	**Jumlah Dokumen Rencana Induk LLAJ Provinsi**												
2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi													
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	0 Dokumen			1 Dokumen	800.000.000							Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi													
	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	0 Dokumen					1 Dokumen	500.000.000					Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
2.15.02.1.01.0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi													
	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	0 Dokumen					8685233639		1 Dokumen	400.000.000,00			Reviu Dokumen Rencana Aksi Keselamatan

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.1.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**		**Unit**		**2.002.912.102,00**		**9.185.233.683,56**		**10.113.725.665,40**		**8.946.000.000,00**		**5.391.000.000,00**	
	Meningkatnya Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Pada Jalan Provinsi Dengan Kondisi Ideal	**Jumlah Kelengkapan Jalan Yang Terpasang dan Terpelihara**												
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi													
	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	27.110 unit	5002	1.727.912.102,00	20.999 unit	8.685.233.683,56	25.646 unit	9.613.725.665,40	19.555 unit	8.446.000.000,00	10.240 unit	4.891.000.000,00	
2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan													
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	1 unit	0	-	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	1 unit	4 Unit	275.000.000,00	5 Unit	300.000.000,00	5 Unit	300.000.000,00	5 Unit	300.000.000,00	5 Unit	300.000.000,00	
2.15.02.1.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**		**Dokumen**		**-**		**800.000.000,00**		**-**		**2.000.000.000,00**		**5.000.000.000,00**	
	Terlaksananya Rencana Pengelolaan Terminal Tipe B	**Jumlah Terminal Tipe B yang dikelola**												
2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B													
	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen		-	1 Dokumen	800.000.000,00		-	-	-		-	Penyusunan Feasibilty Study (FS) Terminal KTT

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang													
	Terbangunnya Terminal Tipe B yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0 unit		-		-		-	1 Unit	2.000.000.000,00	1 Unit	5.000.000.000,00	Pembangunan Terminal KTT
2.15.02.1.05	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**		**Laporan**		**375.444.000,00**		**730.491.000,00**		**1.090.000.000,00**		**1.090.000.000,00**		**1.090.000.000,00**	
	Meningkatnya Pengawasan Keselamatan Jalan Provinsi	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan Jalan**												

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi													
	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	0 Laporan	1 Laporan	120.250.000,00	1 Laporan	262.500.000,00	1 Laporan	540.000.000,00	1 Laporan	540.000.000,00	1 Laporan	540.000.000,00	
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi													
	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	255.194.000,00	1 Laporan	467.991.000,00	1 Laporan	550.000.000,00	1 Laporan	550.000.000,00	1 Laporan	550.000.000,00	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.1.06	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**		**Laporan**		**83.617.500,00**		**164.042.500,00**		**260.000.000,00**		**270.000.000,00**		**270.000.000,00**	
	Tersusunnya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi	**Jumlah Laporan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**												
2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin													
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3 Laporan	1 Laporan	83.617.500,00	1 Laporan	164.042.500,00	1 Laporan	260.000.000,00	1 Laporan	270.000.000,00	1 Laporan	270.000.000,00	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.1.07	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**		**Laporan**		**71.717.600,00**		**131.767.600,00**		**207.000.000,00**		**222.000.000,00**		**246.000.000,00**	
	Meningkatkan Standar Keselamatan Transportasi Darat	**Jumlah Laporan Moda Transportasi Darat Yang Laik Jalan**												
2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum													
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	1 Laporan	71.717.600,00	1 Laporan	131.767.600,00	1 Laporan	207.000.000,00	1 Laporan	222.000.000,00	1 Laporan	246.000.000,00	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.1.08	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**Laporan**		**473.817.600,00**		**612.817.600,00**		**549.000.000,00**		**557.000.000,00**		**557.000.000,00**	
	Tersedianya Pelayanan Angkutan Darat	**Jumlah Trayek Transportasi Darat**												
2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi													
	Terkendalinya dan Terawasinya KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4 Laporan	1 Laporan	166.767.600,00	1 Laporan	259.767.600,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Unit	8 Unit	307.050.000,00	8 Unit	353.050.000,00	8 Unit	349.000.000,00	8 Unit	357.000.000,00	8 Unit	357.000.000,00	
2.15.02.1.10	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**dokumen**		**478.567.600,00**		**131.767.600,00**		**190.000.000,00**		**228.000.000,00**		**1.096.000.000,00**	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersedianya Pelayanan Angkutan Darat	**Jumlah dokumen rencana umum jaringan Trayek Transportasi Darat**												
2.15.02.1.10.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi													
	Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00		-		-		-	1 Dokumen	850.000.000,00	Reviu Dokumen Tatrawil

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.1.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi													
	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	2 Dokumen	128.567.600,00	2 Dokumen	131.767.600,00	2 Dokumen	190.000.000,00	2 Dokumen	228.000.000,00	2 Dokumen	246.000.000,00	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.1.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		Unit		-		**164.042.500,00**		**175.000.000,00**		**187.000.000,00**		**200.000.000,00**	
	Meningkatnya Kualitas Izin Angkutan Darat	**Jumlah Kartu Pengawasan Yang diterbitkan Sesuai Dengan Ketentuan**												

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
	Tersedianya Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	52 Unit	0 Unit	-	3 Unit	164.042.500,00	3 Unit	175.000.000,00	3 Unit	187.000.000,00	3 Unit	200.000.000,00	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**				**3.136.059.459**		**23.237.340.305,11**		**20.702.943.720**		**29.960.000.000**		**23.960.000.000**	
	Meningkatnya Layanan Transportasi Perairan	**Rasio Konektivitas Transportasi Perairan**	**0,13**	**0,53**		**0,80**		**0,93**		**1**		**1**		
		Presentase Keselamatan ASDP	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
2.15.03.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**		Dokumen		**54.000.000,00**		**200.000.000,00**		**250.000.000,00**		**250.000.000,00**		**250.000.000,00**	
	Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut	**Jumlah Penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) Izin Usaha Angkutan**												

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Laut Yang Sesuai Dengan Ketentuan												
2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi													
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasa Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	8 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000,00	12 Laporan	250.000.000,00	Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Perijinan yang menjadi Kewenangan Angkutan Laut Perairan
2.15.03.1.03	**Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek**		Dokumen	**Unit**	**107.500.000,00**		**200.000.000,00**		**200.000.000,00**		**300.000.000,00**		**300.000.000,00**	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan													
	Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau	**Jumlah Penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau Yang Sesuai Dengan Ketentuan**												

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
	Tersedianya Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	0 Unit	3 Unit	25.000.000,00	3 Unit	50.000.000,00	5 Unit	50.000.000,00	5 Unit	100.000.000,00	5 Unit	100.000.000,00	Pertimbangan Teknis Kapal Yang Diperiksa

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi													
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	0 Laporan	13 Laporan	82.500.000,00	13 Laporan	150.000.000,00	13 Laporan	150.000.000,00	13 Laporan	200.000.000,00	13 Laporan	200.000.000,00	Laporan Monitoring dan Evaluasi

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.03.1.05	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**Trayek**		**256.022.864,00**		**400.000.000,00**		**500.000.000,00**		**500.000.000,00**		**500.000.000,00**	
	Tersedianya Pelayanan Transportasi Perairan	**Jumlah Trayek Transportasi Perairan**												
2.15.03.1.05.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi													

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	4 Dokumen	16 Dokumen	106.022.864,00	18 Dokumen	200.000.000	19 Dokumen	250.000.000	19 Dokumen	250.000.000,00	19 Dokumen	250.000.000,00	Dokumen berupa Data Produksi, Dokumen Pertimbangan Teknis Persetujuan Pengoperasian Kapal
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau Dan Penyebrangan Dan persetujan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyebrangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi													

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau Dan Penyebrangan Dan Jumlah Laporan Pengendalian Dan Pengawasan Izin Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyebrangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kab/Kota Dalam Daerah Provinsi	12 Laporan	18 Laporan	150.000.000,00	18 Laporan	200.000.000,00	19 Laporan	250.000.000	19 Laporan	250.000.000,00	19 Laporan	250.000.000,00	Laporan Pertimbangan Teknis SPM, Rampcheck Angkutan Lebaran dan Nataru, Laporan Posko Angkutan Lebaran dan Nataru

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.03.1.06	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**		**Dokumen**		**93.300.000,00**		**135.000.000,00**		**135.000.000,00**		**135.000.000,00**		**135.000.000,00**	
	Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Usaha Jasa Kepelabuhanan	**Jumlah Penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) Izin Usaha Jasa Kepelabuhanan Yang Sesuai Dengan Ketentuan**												

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
	Tersedianya Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan	40 Dokumen	10 Dokumen	49.000.000,00	15 Dokumen	85.000.000,00	15 Dokumen	85.000.000	15 Dokumen	85.000.000,00	15 Dokumen	85.000.000,00	Dokumen Berupa Pertimbangan Teknis

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Serizinan	Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik												
2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan													

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas													
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan	0 Laporan	3 Laporan	44.300.000,00	4 Laporan	50.000.000,00	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000,00	4 Laporan	50.000.000,00	Merupakan Kegiatan Monitorin Perizinan Pertriwulan

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas												
2.15.03.1.07	**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**		**Dokumen**		**35.999.999,00**		**50.000.000,00**		**50.000.000,00**		**50.000.000,00**		**50.000.000,00**	
	Tersusunnya Penetapan Tarif	**Jumlah Dokumen**												

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**												
2.15.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas													

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota													
	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	2 Laporan	35.999.999,00	2 Laporan	50.000.000,00	2 Laporan	50.000.000,00	2 Laporan	50.000.000,00	2 Laporan	50.000.000,00	Laporan Evaluasi Tarif Penyeberangan
2.15.03.1.08	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan**		**Dokumen**		**-**		**925.000.000,00**		**925.000.000,00**		**925.000.000,00**		**925.000.000,00**	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kepentingan (DLKP) Pelabuha Pengumpan Regional													
	Terlaksananya Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	**Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**												
2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan													

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengumpan Regional													
	Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	900.000.000,00	1 Dokumen	900.000.000,00	1 Dokumen	900.000.000,00	1 Dokumen	900.000.000,00	Dokumen Teknis Perencanaan pelabuhan Seperti Rencana Induk Pelabuhan dan DLKr/DLKp
2.15.03.1.08.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan													

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengumpan Regional													
	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	0 Dokumen	-	2 Dokumen	25.000.000,00	2 Dokumen	25.000.000,00	2 Dokumen	25.000.000,00	2 Dokumen	25.000.000,00	Penetapan Dokumen RIP, DLKr/DLKp
2.15.03.1.09	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional'**		Unit		**1.280.000.000,00**		**19.227.340.305,11**		**15.542.943.720,00**		**25.200.000.000,00**		**19.200.000.000,00**	
	Tersedianya Pelabuhan	**Jumlah Pelabuhan Pengumpan**	**2**											

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengumpan Regional	**Regional Yang Dikelola**												
2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional													
	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Regional'	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	8 Unit	1 Unit	420.000.000,00	2 Unit	18.077.340.305,11	2 Unit	14.392.943.720	2 Unit	24.050.000.000,00	2 Unit	18.050.000.000,00	Kegiatan Pembangunan atau Pengembangan Pelabuhan Laut
2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional													
	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional'	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit	2 Unit	810.000.000,00	2 Unit	1.000.000.000	2 Unit	1.000.000.000	2 Unit	1.000.000.000,00	2 Unit	1.000.000.000,00	Kegiatan Rehabilitasi Pelabuhan

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional													
	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000,00	12 Laporan	150.000.000,00	Monitoring Operasional Pelabuhan-Pelabuhan. Monioring Posko Lebaran, Posko Nataru, dan Hari Besar Lainnya
2.15.03.1.10	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**Unit**		**76.000.000,00**		**100.000.000,00**		**1.600.000.000,00**	**-**	**1.600.000.000,00**		**1.600.000.000,00**	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersedianya Simpul-Simpul Transportasi Sungai dan Danau	**Jumlah Simpul Transportasi Perairan Sungai dan Danau**												
2.15.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	0 Unit		-			1 Unit	1.000.000.000,00	1 Unit	1.000.000.000,00	1 Unit	1.000.000.000,00	Kegiatan Pembangunan atau Pengembangan Pelabuhan Sungai
2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai													

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	0 Unit		-			1 Unit	500.000.000,00	1 Unit	500.000.000,00	1 Unit	500.000.000,00	Kegiatan Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Danau
2.15.03.1.10.0006	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang													

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angkutan Sungai dan Danau													
	Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	0 Orang	2 Orang	36.000.000,00	5 Orang	50.000.000,00	5 Orang	50.000.000,00	5 Orang	50.000.000,00	5 Orang	50.000.000,00	Diklat Dan Pelatihan Teknis
2 15 03 1.10.00 07	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan													
	Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	0 Orang	5 Orang	40.000.000,00	5 Orang	50.000.000,00	5 Orang	50.000.000,00	5 Orang	50.000.000,00	5 Orang	50.000.000,00	Diklat Dan Pelatihan Teknis
2.15.03.1.12	**Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk**		**Dokumen**		**1.233.2**		**2.000.000.000,00**		**1.500.000.000,00**		**1.000.000.000,00**		**1.000.000.000,00**	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelabuhan Pengumpan Regional				**36.596,00**									
	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	**Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional**												
2.15.03.1.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	3 Dokumen	1.233.236.596,00	3 Dokumen	2.000.000.000	3 Dokumen	1.500.000.000	2 Dokumen	1.000.000.000,00	2 Dokumen	1.000.000.000,00	Dokumen Teknis Perencanaan pelabuhan Seperti FS, DED, AMDAL dan Lainnya

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	UPTD PELABUHAN TENGKAYU 1 TARAKAN				**3.600.304.984**		**5.062.558.460,01**		**5.374.844.912**		**5.722.728.171**		**5.815.428.171**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**				**3.600.304.984**		**5.062.558.460,01**		**5.374.844.912**		**5.722.728.171**		**5.815.428.171**	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	**Presentase Pemenuhan Layanan Kinerja Administrasi Perangkat Daerah**			100%	100%		100%		100%		100%		
2.15.01.1.01	**Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**10.850.000,00**		**25.000.000,00**		**25.000.000,00**		**35.000.000,00**		**35.000.000,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai standar regulasi	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengaggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**											

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	-	2 Dokumen	10.850.000,00	2 Dokumen	25.000.000,00	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	35.000.000,00	2 Dokumen	35.000.000,00	
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.889.220.984,00**		**2.184.835.060,01**		**2.184.835.060,28**		**2.371.604.771,00**		**2.371.604.771,00**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai regulasi	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**Dokumen**											
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	1.889.220.984,00	12 Dokumen	2.184.835.060,01	12 Dokumen	2.184.835.060	12 Dokumen	2.371.604.771,00	12 Dokumen	2.371.604.771,00	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**				**15.100.000,00**		**30.000.000,00**		**30.000.000,00**		**50.000.000,00**		**55.000.000,00**	
	Meningkatnya Administrasi Pelayanan Pendapatan Retribusi Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Laporan**											
2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah													
	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	-	12 Laporan	15.100.000,00	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000,00	12 Laporan	50.000.000,00	12 Laporan	55.000.000,00	
2.15.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**50.000.000,00**		**100.000.000,00**		**105.000.000,00**		**190.000.000,00**		**120.000.000,00**	
	Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Administrasi	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**Dokumen**											

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kepegawaian Yang Sesuai Standar Peraturan Yang Berlaku	**Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Standar**												
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya													
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya	-	0 Paket	-	-	-	-	-	105 Paket	70.000.000,00	-	-	
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	4 Orang	50.000.000,00	6 Orang	100.000.000	7 Orang	105.000.000	8 Orang	120.000.000,00	8 Orang	120.000.000,00	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**580.800.000,00**		**1.073.650.000,00**		**1.116.650.000,00**		**1.116.650.000,00**		**1.121.650.000,00**	
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi	**Persentase Layanan Administrasi Umum**	**Persen**											

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Umum Perangkat Daerah	**Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Layanan**												
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Paket	4 Paket	15.000.000,00	10 Paket	70.000.000	10 Paket	100.000.000	10 Paket	100.000.000,00	10 Paket	100.000.000,00	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	12 Paket	122.340.000,00	12 Paket	175.550.000	12 Paket	175.550.000	12 Paket	175.550.000,00	12 Paket	175.550.000,00	
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7 Paket	5 Paket	52.800.000,00	10 Paket	105.545.000	10 Paket	105.545.000	10 Paket	105.545.000,00	10 Paket	105.545.000,00	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.06.0004	Penyedia Bahan Logistik Kantor													
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 Paket	10 Paket	127.800.000,00	10 Paket	100.555.000	10 Paket	110.555.000	10 Paket	110.555.000,00	10 Paket	115.555.000,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	111.000.000,00	12 Paket	220.000.000	12 Paket	220.000.000	12 Paket	220.000.000,00	12 Paket	220.000.000,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.860.000,00	12 Dokumen	2.000.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000,00	12 Dokumen	5.000.000,00	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000,00	12 Laporan	400.000.000,00	
2.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**205.100.000,00**		**307.552.350,00**		**310.552.350,00**		**310.552.350,00**		**335.552.350,00**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Regulasi	**Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan**	**Unit**											

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	1 Unit	35.000.000,00	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	2 Paket	7 Paket	89.100.000,00	10 Paket	150.000.000	10 Paket	150.000.000	10 Paket	150.000.000,00	10 Paket	170.000.000,00	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan mesin dan lainnya yang disediakan	5 Unit	10 Unit	81.000.000,00	10 Unit	107.552.350	11 Unit	110.552.350	11 Unit	110.552.350,00	12 Unit	115.552.350,00	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**274.444.000,00**		**350.000.000,00**		**350.000.000,00**		**350.000.000,00**		**350.000.000,00**	
	Menigkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**												
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000,00	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000,00	12 Laporan	5.000.000,00	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	270.944.000,00	12 Laporan	345.000.000	12 Laporan	345.000.000	12 Laporan	345.000.000,00	12 Laporan	345.000.000,00	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**574.790.000,00**		**991.521.050,00**		**1.252.807.502,00**		**1.298.921.050,00**		**1.426.621.050,00**	
	BMD yang terpelihara	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara**	**Unit**											

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 Unit	11 Unit	397.760.000,00	11 Unit	535.575.250,00	11 Unit	626.761.702	11 Unit	635.575.250,00	11 Unit	635.575.250,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit	15 Unit	77.030.000,00	15 Unit	105.555.500,00	15 Unit	105.555.500	15 Unit	115.555.500,00	15 Unit	125.555.500,00	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	-	1 Unit	95.135.000,00	1 Unit	95.235.000	1 Unit	102.535.000,00	1 Unit	105.235.000,00	
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan Rehabilitasi/ Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	255.255.300,00	1 Unit	425.255.300	1 Unit	445.255.300,00	1 Unit	560.255.300,00	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN				**3.139.304.985**		**3.423.485.527,09**		**4.045.905.133**		**3.654.311.383**		**3.674.311.383**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**		**Persen**		**3.139.304.985**		**3.423.485.527,09**		**4.045.905.133**		**3.654.311.383**		**3.674.311.383**	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	**Presentase Pemenuhan Layanan Kinerja Administrasi Perangkat Daerah**		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.137.503.376,00**		**2.093.567.636,09**		**2.255.787.241,55**		**2.384.193.492,00**		**2.384.193.492,00**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai regulasi	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**Dokumen**											

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	1.137.503.376,00	12 Dokumen	2.093.567.636	12 Dokumen	2.255.787.242	12 Dokumen	2.384.193.492,00	12 Dokumen	2.384.193.492,00	
2.15.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**161.800.000,00**		**101.800.000,00**		**60.000.000,00**		**60.000.000,00**		**60.000.000,00**	
	Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Sesuai Standar Peraturan Yang Berlaku	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Standar**	**Dokumen**											

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya													
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya kelengkapanny a	-	76 Paket	41.800.000,00	76 Paket	41.800.000							
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	8 Orang	120.000.000,00	4 Orang	60.000.000	4 Orang	60.000.000	4 Orang	60.000.000,00	4 Orang	60.000.000,00	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**787.080.618,00**		**687.080.618,00**		**687.080.618,00**		**687.080.618,00**		**687.080.618,00**	
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang**	**Persen**											

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Sesuai Standar Layanan												
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3 Paket	18.313.500,00	3 Paket	18.313.500	3 Paket	18.313.500	3 Paket	18.313.500,00	3 Paket	18.313.500,00	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	12 Paket	89.560.778,00	12 Paket	89.560.778	12 Paket	89.560.778	12 Paket	89.560.778,00	12 Paket	89.560.778,00	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	12 Paket	79.206.340,00	12 Paket	79.206.340	12 Paket	79.206.340	12 Paket	79.206.340,00	12 Paket	79.206.340,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000,00	12 Laporan	500.000.000,00	
2.15.01.1.08	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**371.200.000,00**		**124.000.000,00**		**626.000.000,00**		**106.000.000,00**		**126.000.000,00**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Regulasi	**Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan**	**Unit**											

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit			1 Unit	40.000.000	1 Unit	550.000.000					
	Pengadaan Mebel													
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan		10 Paket	100.000.000,00	5 Paket	50.000.000	5 Paket	50.000.000	5 Paket	50.000.000,00	5 Paket	50.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan mesin dan lainnya yang disediakan	4 Unit	31 Unit	271.200.000,00	2 Unit	34.000.000	3 Unit	26.000.000	2 Unit	56.000.000,00	4 Unit	76.000.000,00	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**455.740.347,00**		**291.056.629,00**		**291.056.629,00**		**291.056.629,00**		**291.056.629,00**	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Menigkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**												
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.700.000,00	12 Laporan	1.700.000	12 Laporan	1.700.000,00	12 Laporan	1.700.000,00	12 Laporan	1.700.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	454.040.347,00	12 Laporan	289.356.629	12 Laporan	289.356.629,00	12 Laporan	289.356.629,00	12 Laporan	289.356.629,00	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**225.980.644,00**		**125.980.644,00**		**125.980.644,00**		**125.980.644,00**		**125.980.644,00**	
2.15.01.1.09	**BMD yang terpelihara**	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara**	**Unit**											
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan	2 Unit	3 Unit	16.320.000,00	3 Unit	16.320.000,00	3 Unit	16.320.000,00	3 Unit	16.320.000,00	3 Unit	16.320.000,00	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Operasional atau Lapangan	dibayarkan pajak dan perizinannya												
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	16 Unit	16.800.000,00	16 Unit	16.800.000,00	16 Unit	16.800.000,00	16 Unit	16.800.000,00	16 Unit	16.800.000,00	
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan Rehabilitasi/ Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	9 Unit	192.860.644,00	1 Unit	92.860.644,00	1 Unit	92.860.644,00	1 Unit	92.860.644,00	1 Unit	92.860.644,00	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Selanjutnya disajikan beberapa sub kegiatan prioritas yang mendukung Outcome Program pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara :

Tabel IV.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatnya Layanan Transportasi Darat	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
			Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya Layanan Transportasi Perairan	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

4.2 Kinerja Pelayanan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Dinas Perhubungan Kalimantan Utara diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Tabel IV.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Konektivitas	Rasio	0,13	0,27	0,40	0,47	0,75	1,00	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Transportasi	Indeks	77,25	77,3	77,4	77,45	78	78,2	
3	Prersentase Keselamatan Transportasi	Persen	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Konektivitas Provinsi	Rasio	0,13	0,27	0,40	0,47	0,75	1,00	Perumusan Pada pedoman Kepmendagri belum menjelaskan Perhitungan Rasio Konektivitas dan berbeda dengan perumusan Rasio Konektivitas Oleh **Kementerian Perhubungan.** **Rumusan target menggunakan Formulasi Kementerian Perhubungan (termasuk Penyesuain capaian pada *base line* 2024)** **FORMULASI :** **(Konektivitas Transportasi Angkutan Jalan (Darat) + Konektivitas Transportasi Sungai Danau Dan Penyebrangan (Perairan))/ 2**
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan daerah	%	48,88	59,98	68,52	75,8	79,25	82,16	Menggunakan rumus sesuai dengan Kepmendagri dengan mencari kondisi ideal pada masing masing jenis kelengkapan jalan dan rata-rata dari tiap perhitungan jenis perlengkapan jalan menjadi capaian pertahun
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	100	100	100	100	100	100	Hanya ada 1 perusahaan angkutan umum yang ada di kalimantan utara yaitu DAMRI. hingga tahun 2024 belum tersertifikasi SMK
4	Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor yang laik jalan	%	0,735	0,75	0,775	0,795	0,81	0,83	Dari 5 Kab/Kota, hanya 2 yang memiliki Unit Pengujian Kendaraan Bermotor. maka dari itu data yang disajikan hanya meliputi presentase Kota Tarakan dan Kab. Bulungan

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Rencana Strategis ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan utara 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kalimantan Utara. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antar perangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan utara. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2045 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Utara periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian Dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Provinsi Kalimantan Utara dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Provinsi Kalimantan Utara Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulai yang berlaku.